

**PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA *TAX*
EVASION BERDASARKAN *GENDER* DAN
EDUCATION LEVEL PADA MAHASISWA VOKASI
DAN SARJANA PERPAJAKAN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

FATIMAH NUR ADHA

NIM. 155030407111056



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah 5-6

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

Q.S Hund : 88

“Berproses walaupun sedikit setiap harinya, setidaknya hari-harimu menjadi produktif”

Fatimah Cantik

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Perbedaan Persepsi Mengenai Etika *Tax Evasion*
Berdasarkan *Gender* dan *Education Level* pada Mahasiswa
Vokasi dan Sarjana Perpajakan Universitas Brawijaya

Disusun oleh : Fatimah Nur Adha

NIM : 155030407111056

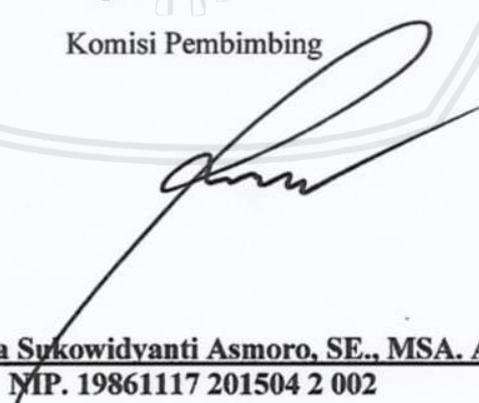
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 29 November 2019

Komisi Pembimbing


Priandhita Sukowidvanti Asmoro, SE., MSA. Ak.
NIP. 19861117 201504 2 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Univeritas Brawijaya pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Desember 2019
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Fatimah Nur Adha (155030407111056)
Judul : Perbedaan Persepsi Mengenai Etika *Tax Evasion*
Berdasarkan *Gender* dan *Education Level* pada
Mahasiswa Vokasi dan Sarjana Perpajakan
Universitas Brawijaya

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Priandhita Sukowidnyanti Asmoro, SE., MSA. Ak
NIP. 198611172015042002

Anggota,

Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA. Ak
NIP. 198812232015042001

Anggota,

Latifah Hanum, SE., MSA.
NIP. 2014058406172001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 29 November 2019

Mahasiswa



Nama : Fatimah Nur Adha

NIM : 155030407111056

RINGKASAN

Fatimah Nur Adha, 2019, **Perbedaan Persepsi Mengenai Etika *Tax Evasion* Berdasarkan Gender dan Education Level pada Mahasiswa Vokasi dan Sarjana Perpajakan Universitas Brawijaya**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak, 126 hal + xvii.

Tax evasion merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terhutang secara ilegal (tidak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan) dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sehingga tingkat ilegalitasnya tinggi. Sementara itu, persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* akan dilihat dari keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Penelitian ini akan membedakan persepsi tersebut berdasarkan *gender* dan *education level*. Hal ini karena tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender* dan *education level*.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya dengan jumlah 1095. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *proportionate stratified random sampling* sehingga sampel berjumlah 293 mahasiswa dengan porsinya masing-masing. Penelitian ini menggunakan *independent samples t-test* untuk mengetahui perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* jika dibedakannya berdasarkan *gender*. Namun, penelitian ini dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* jika dibedakan berdasarkan *education level*. Hal ini mendukung teori Teleologi jika kita melihatnya dari *gender* yang menempuh Program S1 (Sarjana) Perpajakan di Universitas Brawijaya.

Kata kunci: Persepsi, Etika, *Tax Evasion*, Gender, Tingkat Pendidikan

SUMMARY

Fatimah Nur Adha, 2019, Differences in Perceptions Regarding The Ethics of Tax Evasion Based on Gender and Education Level in Vocational and Bachelor Students in Taxation Brawijaya University. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak, 126 pages + xvii.

Tax evasion is an effort of taxpayers to avoid tax owed illegally (not in accordance with tax legislation) by hiding the real situation, so the level of illegality is high. Meanwhile, students' perceptions about the ethics of tax evasion will be seen from tax justice, the taxation system, and discrimination. This research will differentiate these perceptions based on gender and education level. This is because the purpose of the research conducted by researchers is to find out whether there are significant differences in students' perceptions about the ethics of tax evasion based on gender and education level.

This type of research uses a comparative type of research with a quantitative approach that is comparing between two or more groups of a particular variable. The population in this study were D3 (Vocational) and S1 (Bachelor) students of Universitas Brawijaya with a total of 1095. This study used a sampling technique that is proportionate stratified random sampling so that the sample amounted to 293 students with their respective portions. This study uses independent samples t-test to identify differences in perceptions about the ethics of tax evasion.

The results of this study indicate that there are no significant differences in students' perceptions about the ethics of tax evasion if they are differentiated by gender. However, this study can prove that there are significant differences in students' perceptions about the ethics of tax evasion if they are differentiated based on education level. This supports the theory of Teleology if we look at it from gender who take the Taxation S1 Program at Brawijaya University.

Keyword : Perception, Tax Evasion, Ethics, Gender, Education Level



**KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
KEPADA PAPA DAN MAMA TERCINTA
KAKAK DAN ADIKKU
SERTA SEMUA SAHABAT DAN TEMAN DEKATKU ZEYENG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perbedaan Persepsi Mengenai Etika *Tax Evasion* Berdasarkan Gender dan Education Level pada Mahasiswa Vokasi dan Sarjana Perpajakan Universitas Brawijaya**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr., S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA, AK, CA selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan sangat sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan, serta dorongan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.



5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staff Pengajar, dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orangtua Penulis Bapak Sudarmoko dan Ibu Erita Yusman yang selalu mendo'akan penulis, memberikan dukungan dan motivasi, dan kasih sayangnya yang tiada terukur kepada anaknya.
7. Kak bona yang membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
8. Andre Julianto yang selalu mendukung penulis, memberikan semangat dalam keadaan apapun, sabar menghadapi penulis dan selalu setia menunggu penulis untuk memberikan kabar dan selalu menanti kepulangan penulis.
9. Sahabat tercinta yaitu Indah, Isma, Holid, Anaf, Niken, dan Abah yang selalu memberikan dorongan kepada penulis agar mengerjakan skripsi secepat mungkin agar cepat lulus.
10. Teman dekat penulis yang seperti keluarga sendiri yaitu Nur, Della, Deбри, Yulis, Acik, dan teman kost lainnya yang selalu mendorong penulis agar cepat lulus, serta mebantuu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Theo dan Sinung yang selalu setia mengantar penulis ketika masuk UGD.
12. Sinung lagi dan Zahnas yang membantu penulis dalam mendistribusikan kuesioner.
13. Teman seperbimbingan penulis yaitu Tara, Eldy Baleya, Ajeng, dan Vina Kholida yang selalu membantu penulis dengan berdiskusi bersama.
14. Teman sepermainan yang namanya "Istri Idaman".

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuannya selama proses pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun dan bermanfaat sangat diharapkan oleh penulis. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 29 November 2019



Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kontribusi Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Empiris	14
2.2. Tinjauan Teoritis	21
2.2.1. Teori Teleologi	21
2.2.2. Persepsi	29
2.2.3. Etika	32
2.2.3.1. Sejarah Etika	32
2.2.3.2. Pengertian Etika	34
2.2.4. <i>Tax Evasion</i>	36
2.2.5. Persepsi Mengenai Etika <i>Tax Evasion</i>	38



2.2.6. Karakteristik Demografis	48
2.2.6.1. <i>Gender</i>	48
2.2.6.2. <i>Education Level</i>	49
2.3. Model Konsep dan Hipotesis	50
2.3.1. Model Konsep	50
2.3.2. Model dan Pengembangan Hipotesis	51
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Jenis Penelitian	57
3.2. Lokasi Penelitian	57
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	58
3.3.1. Variabel Penelitian	58
3.3.2. Definisi Operasional Variabel	59
3.3.2.1. <i>Gender</i>	59
3.3.2.2. <i>Education Level</i>	59
3.3.2.3. Persepsi Mahasiswa Mengenai <i>Tax Evasion</i>	60
3.4. Skala Pengukuran	61
3.5. Jenis dan Sumber Data	63
3.6. Populasi dan Sampel	64
3.6.1. Populasi	64
3.6.2. Sampel	65
3.7. Teknik Pengumpulan Data	67
3.8. Metode Analisis Data	70
3.8.1. Uji Instrumen Penelitian	70
3.8.1.1. Uji Validitas	70
3.8.1.2. Uji Reliabilitas	71
3.8.2. Uji Asumsi Klasik	71
3.8.2.1. Uji Normalitas	72
3.8.3. Analisis Statistik Deskriptif	72
3.8.4. Uji Beda (<i>Independent Samples t-Test</i>)	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75

4.2. Gambaran Umum Responden	77
4.2.1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77
4.2.2. Berdasarkan Jenis Kelamin	78
4.2.3. Berdasarkan Angkatan	79
4.2.4. Berdasarkan Usia	80
4.2.5. Berdasarkan Pengalaman Kerja	82
4.2.6. Berdasarkan NPWP	82
4.2.7. Berdasarkan Provinsi	83
4.2.8. Berdasarkan Urutan Anak	88
4.2.9. Berdasarkan Agama	89
4.2.10. Berdasarkan Status Pernikahan	90
4.3. Analisis Hasil Penelitian	91
4.3.1. Pengujian Instrumen Penelitian	91
4.3.1.1. Uji Validitas	91
4.3.1.2. Uji Reliabilitas	93
4.3.2. Uji Asumsi Klasik	93
4.3.2.1. Uji Normalitas	94
4.3.3. Metode Analisis Data	94
4.3.3.1. Uji Statistik Deskriptif	94
4.3.4. Uji Hipotesis	96
4.3.4.1. <i>Independent Samples t-test</i>	96
4.4. Pembahasan	99
BAB V PENUTUP.....	104
5.1. Kesimpulan	104
5.2. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	115



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
2	Pengukuran Variabel Penelitian	61
3	Skala Likert	62
4	Populasi	65
5	<i>Proportionate Stratified Random Sampling</i>	67
6	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77
7	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	78
8	Responden Berdasarkan Angkatan	79
9	Responden Berdasarkan Usia	81
10	Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja	82
11	Responden Berdasarkan NPWP	83
12	Responden Berdasarkan Provinsi	83
13	Responden Berdasarkan Urutan Anak	88
14	Responden Berdasarkan Agama	89
15	Responden Berdasarkan Status Pernikahan	90
16	Hasil Uji Validitas	92
17	Hasil Uji Reliabilitas	93
18	<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	94
19	Hasil Statistik Deskriptif	95
20	<i>Group Statistics Gender</i>	96
21	<i>Independent Samples Test Gender</i>	97
22	<i>Group Statistics Education Level</i>	97
23	<i>Independent Samples Test Education Level</i>	98



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Teori Teleologi	29
2	Faktor Persepsi	32
3	<i>Unifying Conceptual Framework of Corporate Tax Planning</i>	37
4	Model Konsep	50
5	Model Hipotesis	55
6	Universitas Brawijaya	75



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Surat Pra Riset D3 Universitas Brawijaya	115
2	Surat Pra Riset S1 Universitas Brawijaya	116
3	Data Uji <i>Pilot Test</i>	117
4	Uji Validitas	118
5	Uji Reliabilitas	119
6	Uji Normalitas	121
7	Statistik Deskriptif	122
8	<i>Independent samples t-test</i>	123
9	Pembagian Kuesioner	124



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 merubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Sistem *self assessment* akan terlaksana dengan baik jika wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sudut pandang pemerintah, jika wajib pajak membayarkan jumlah pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sementara itu, dari sisi wajib pajak ketika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengakibatkan kerugian (Pohan, 2013:3).

Kerugian yang dirasakan oleh wajib pajak yaitu ketika beban pajak yang terhutang lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan yang diterimanya karena sistem perpajakan yang tidak adil. Selain itu, ketika pajak yang terhutang jumlahnya terlalu besar, penghasilan wajib pajak akan berkurang sehingga keuntungan yang diperoleh juga semakin sedikit dan kebutuhan yang seharusnya bisa terpenuhi menjadi tidak bisa terpenuhi (Yee, Moorthy, dan Soon, 2017). Oleh karena itu, wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pajak yang terhutang. Cara yang digunakan wajib pajak untuk meminimalisir pajak yang terhutang yaitu dengan cara *tax planning* (Pohan, 2013:22).

Tax planning merupakan analisis yang dilakukan secara sistematis dari berbagai pilihan atau opsi pajak yang bertujuan agar pajak yang dibebankan dapat



diminimalisir pada masa pajak kini serta masa pajak yang akan datang (Crumbley, Friedman, dan Anders, 1994:4). *Tax planning* dilakukan dengan tiga cara yaitu *tax avoidance*, *tax saving*, dan *tax evasion*. Ketiga cara tersebut memiliki perbedaan konsep, dimana *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang memanfaatkan kelemahan undang-undang (*grey area*) (Pohan, 2013:23).

Selanjutnya, *tax saving* merupakan upaya wajib pajak untuk mengelak utang pajaknya dengan menahan diri untuk tidak membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya dan sebagainya. Sementara itu, *tax evasion* merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2013:23). Selain itu, *tax evasion* juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi ataupun menghapus pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2007:49). Hal ini lebih dipertegas lagi dengan penelitian Lietz (2013) yang mengatakan bahwa *tax evasion* memiliki tingkat ketidakpatuhan dan ilegalitas yang paling tinggi. Berdasarkan tiga cara yang telah dijelaskan tersebut, cara yang paling ilegal untuk dilakukan oleh wajib pajak yaitu *tax evasion*.

Tax evasion dikatakan ilegal karena cara yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, berbeda dengan *tax avoidance* dan *tax saving* yang menggunakan cara legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kebanyakan masyarakat melakukan *tax evasion* karena

diperlukan pemahaman yang memadai untuk melakukan *tax planning* dengan cara *tax avoidance* dan *tax saving*. *Tax evasion* juga dilakukan oleh wajib pajak karena kurangnya manfaat yang dirasakan ketika mereka melakukan kewajiban perpajakannya (Yee, Moorthy, dan Soon, 2017).

Tax evasion menjadi permasalahan otoritas perpajakan di berbagai negara. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data dari *Media Business News* yaitu *Top Tax Evasion Countries* pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa terdapat sepuluh negara memiliki tingkat *tax evasion* paling besar di dunia. Negara United State menempati peringkat pertama dengan jumlah pajak yang tidak dibayarkan sebesar \$337.3 *billions*. Kemudian disusul oleh negara Brazil dengan jumlah pajak yang tidak dibayarkan sebesar \$280.1 *billions* pada peringkat kedua. Selanjutnya negara Italia (\$238.7 *billions*), Russia (\$221 *billions*), Jerman (\$215 *billions*), Perancis (\$171.3 *billions*), Jepang (\$171.1 *billions*), Cina (\$134.4 *billions*), United Kingdom (\$109.2 *billions*), dan pada peringkat kesepuluh ditempati oleh negara Spanyol dengan jumlah pajak yang tidak dibayarkan sebesar \$107.4 *billions* (*Media Business News*, 2012).

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan negara terbesar dari segi pajak, mengalami permasalahan yang sama yaitu *tax evasion* (Badan Pusat Statistik, 2019). Praktik *tax evasion* yang terjadi di Indonesia meningkat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pajak yang tidak dibayarkan diperkirakan sebesar Rp110 triliun yang dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap tahunnya. Selain itu, selama tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014, jumlah kerugian negara yang mengalir secara ilegal ke luar negeri mencapai Rp910 triliun (Himawan, 2017).

Ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh kebanyakan wajib pajak merupakan akibat dari kegagalan etis atau *ethical failure* (Hartman dan Desjardins, 2008). Kegagalan etis atau *ethical failure* pada wajib pajak menyebabkan *tax evasion* akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum wajib pajak terhadap tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian McGee (2006) yang menjelaskan bahwa *tax evasion* dianggap suatu hal yang etis. *Tax evasion* dianggap etis karena minimnya keadilan dalam penggunaan dana yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan imbalan atas pajak yang telah dibayarkan tidak dirasakan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, *tax evasion* mengakibatkan kurangnya tingkat pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya (Pohan, 2013:3).

Persepsi mengenai etika *tax evasion* merupakan pandangan individu terhadap tindakan *tax evasion* yang didukung dengan situasi sekitar sehingga individu dapat memberikan pandangan bahwa *tax evasion* merupakan suatu tindakan yang tidak etis, etis, atau terkadang etis. Penelitian McGee (2006) menjelaskan persepsi etika *tax evasion* dengan menggunakan *Social Contract Theory* yang menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, teori ini kurang mampu menjelaskan persepsi etika *tax evasion* berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini. Sementara itu, di dalam penelitian ini akan menjelaskan etika *tax*

evasion dengan menggunakan teori Teleologi karena lebih bisa menjelaskan persepsi etika *tax evasion* berdasarkan fenomena (situasi) yang terjadi saat ini dan lebih mendekati. Menurut teori Teleologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk jika dilihat dari akibat, manfaat, atau tujuannya. Teori Teleologi dibagi menjadi dua, yaitu egoisme etis dan etika utilitarianisme. Adapun yang dimaksud egoisme etis yaitu seseorang menilai tindakan itu baik jika mendatangkan manfaat ke orang yang melakukannya. Sementara itu, etika utilitarianisme menilai tindakan itu baik jika mendatangkan manfaat bagi banyak orang (Ratnawati *et al.*, 2016:27).

Ketika wajib pajak patuh dan kebanyakan dari mereka merasa dirugikan karena sistem pajak yang tidak adil, dan sebagainya, maka wajib pajak kemungkinan berpersepsi jika negara tidak memberikan manfaat untuk banyak orang seperti etika utilitarianisme. Oleh karena itu, *tax evasion* merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan egoisme etis pada teori Teleologi. Hasil penelitian McGee dan Shopovski (2018) serta McGee, Djatej, dan Sarikas (2012) menyatakan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis karena banyaknya korupsi yang terjadi, minimnya keadilan pajak, serta imbalan yang tidak dirasakan oleh wajib pajak saat mereka melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa walaupun wajib pajak tidak mendapatkan manfaat secara langsung atas pajak yang dibayarkan. Hal itu menunjukkan bahwa

wajib pajak harus tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun belum merasakan keuntungan timbal balik berupa fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah secara langsung. Adapun fasilitas yang diberikan yaitu berupa sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siringoringo, 2018). Jadi, *tax evasion* dipandang tidak etis karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, penelitian McGee (2007) mengatakan bahwa tidak ada argumen yang kuat untuk membenarkan *tax evasion* sebagai tindakan yang etis, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lietz (2013), *tax evasion* dipandang tidak etis karena tingkat ketidakpatuhan dan ilegalitasnya tinggi. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki resiko yang tinggi ketika memilih *tax evasion* sebagai *tax planning*-nya. Hasil penelitian McGee *et al.* (2012) mengatakan bahwa *tax evasion* di negara Argentina, Guatemala, Polandia, Romania, United Kingdom, dan United State merupakan tindakan yang tidak etis. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cohn (1998), serta DeMerville (1998) yang menunjukkan bahwa *tax evasion* tidak pernah etis ataupun tidak bisa dibenarkan, karena melanggar hukum yang berlaku.

Selain adanya pandangan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis atau tidak etis, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang terkadang etis. Hasil penelitian Sezgin, Yildiz, dan Ayyildiz (2011) mengatakan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang dipandang terkadang etis. Hal tersebut mengandung arti bahwa *tax evasion* etis

dalam beberapa kasus dan tidak etis dalam beberapa kasus lainnya. Ketika sistem perpajakan tidak adil, beban pajak yang terhutang oleh wajib pajak lebih besar daripada penghasilan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak akan berpersepsi bahwa *tax evasion* dipandang etis.

Tax evasion dipandang etis karena wajib pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Sementara itu, *tax evasion* juga dipandang tidak etis jika sistem perpajakan adil, serta beban pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuannya (McGee, Aljaaidi, dan Musaibah, 2012). Oleh karena itu, wajib pajak cenderung menganggap *tax evasion* sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak melakukannya karena wajib pajak sadar akan kewajibannya kepada negara dan takut dikenai sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana (McGee, Ho, dan Li, 2008). Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee, Ho, dan Li (2008), serta McGee dan Guo (2007).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan sudut pandang mengenai etika *tax evasion* yaitu etis, tidak etis, dan terkadang etis. Ketiga sudut pandang itu dapat dilihat dari tiga dimensi karakteristik *tax evasion*. Menurut McGee (2006), tiga dimensi karakteristik *tax evasion* tersebut yaitu: 1) Keadilan pajak yang berkaitan dengan manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat seperti jasa-jasa pemerintah yang meliputi berbagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2) Sistem perpajakan yang berkaitan dengan administratif pajak seperti tarif pajak, dan 3) Diskriminasi yang berkaitan dengan perihal yang menguntungkan satu kelompok (Siringoringo, 2018).

Selain itu, penelitian McGee *et al.* (2012) mengatakan bahwa persepsi mahasiswa di enam negara mengenai etika *tax evasion* berbeda-beda berdasarkan karakteristik demografinya. Karakteristik demografis pada penelitian tersebut diantaranya seperti *gender* dan *education level*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh McGee, Djatej, dan Sarikas (2012) membedakan persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* berdasarkan karakteristik demografis juga yaitu *gender*, *age*, dan *academic major*. Penelitian ini menggunakan karakteristik demografis yaitu *gender* dan *education level* sebagai variabel independen yang merupakan variabel pembeda.

Gender digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini untuk membedakan persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* karena secara umum *gender* memiliki perbedaan kedudukan, peran, serta sifat yang dilekatkan pada kaum wanita maupun pria melalui konstruksi secara sosial maupun kultural (Nurhaeni, 2009). Wanita cenderung dianggap lebih mematuhi peraturan dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, pria kemungkinan ketidapatuhannya lebih besar jika dibandingkan dengan wanita. Ketika ketidapatuhannya lebih besar, kemungkinan pria akan cenderung menganggap *tax evasion* merupakan tindakan yang etis jika dibandingkan dengan wanita (Alasfour, Samy, dan Bampton, 2016).

Selanjutnya, penggunaan variabel *education level* untuk membedakan persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* karena pengetahuan yang mereka dapatkan berbeda-beda sehingga membuat persepsi mereka terhadap etika *tax evasion* juga menjadi berbeda-beda (McGee *et al.*, 2012). Mahasiswa D3 (Vokasi) lebih mempelajari praktik perpajakannya, sedangkan mahasiswa S1 (Sarjana) lebih

mempelajari teori perpajakannya (Rohman, 2019). Ketika dihadapkan dengan kondisi yang mendukung untuk melakukan penghindaran pajak, seseorang yang hanya mengetahui permukaan pengetahuan perpajakan saja kemungkinan akan lebih cenderung memilih *tax evasion* karena mudah untuk dilakukan (Alasfour, Samy, dan Bampton, 2016).

Sementara itu, seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan secara mendalam akan lebih teliti dan mencari cara legal dengan mencari celah undang-undang perpajakan untuk meminimalisir resiko (Alasfour, Samy, dan Bampton, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan seluruh mahasiswa aktif Perpajakan D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana) Universitas Brawijaya Malang. Adapun alasan penelitian memilih Universitas Brawijaya Malang, karena di Malang Universitas yang memiliki program studi Perpajakan hanya di Universitas Brawijaya Malang.

Berdasarkan adanya fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Perbedaan Persepsi Mengenai Etika *Tax Evasion* Berdasarkan Gender dan Education Level pada Mahasiswa Vokasi dan Sarjana Perpajakan Universitas Brawijaya**”. Penelitian ini dilakukan di Universitas Brawijaya karena universitas tersebut memiliki Program Studi Perpajakan baik S1 (Sarjana) maupun D3 (Vokasi). Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* dengan pemahaman perpajakan yang memadai terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Selain itu, belum ada penelitian di Indonesia yang membahas

tentang perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan karakteristik demografisnya yaitu *gender* dan *education level*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *education level* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *education level* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kontribusi dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori Teleologi berdasarkan persepsi mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya mengenai etika *tax evasion* yang dilihat dari dimensi karakteristik *tax evasion* itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi perbedaan antara temuan empiris serta inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan menjadi wajib pajak, dalam menyikapi tindakan *tax evasion*. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat memperbaiki sikap mahasiswa kedepannya agar menjadi wajib pajak yang patuh.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah atas *tax evasion* yang terjadi dengan mengevaluasi kinerjanya melalui persepsi mahasiswa sebagai calon wajib pajak mengenai etika *tax evasion*. Ada baiknya juga jika pemerintah menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar penyusunan kebijakan yang mampu mengeliminasi tindakan *tax evasion* wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mengetahui dan memahami isi dari penelitian ini. Selain itu, sistematika penulisan ini juga berdasarkan pada pedoman dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, landasan teori yang memperkuat penelitian ini, model konsep, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

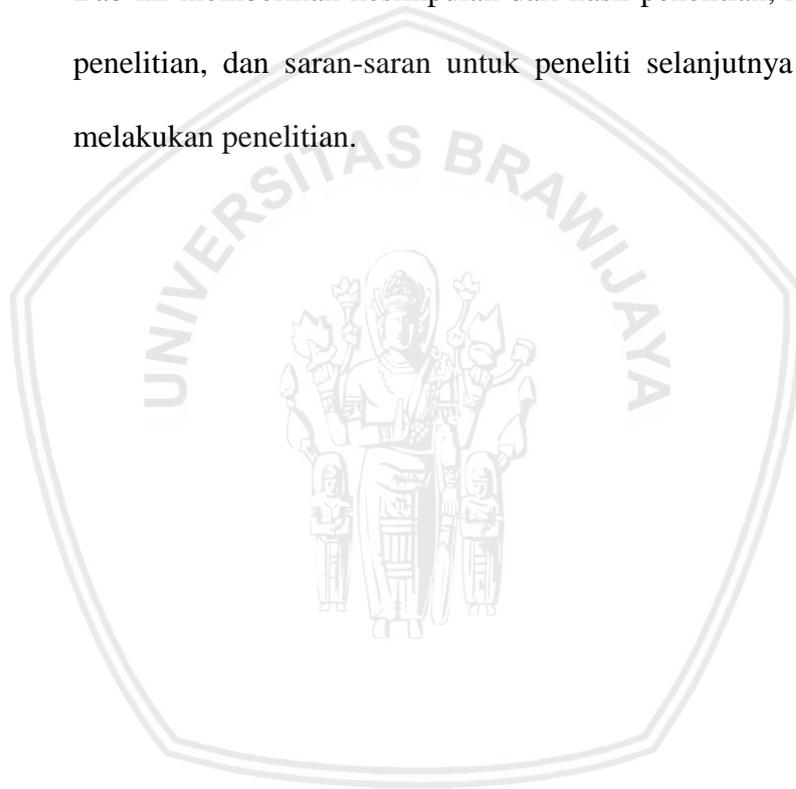
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel dan pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini dan pembahasan mengenai gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, hasil analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan komponen penting dalam melaksanakan penelitian. Tinjauan empiris digunakan untuk menunjang penelitian itu sendiri dan memperkuat kerangka pemikiran peneliti. Khususnya, yang berkaitan dengan perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan karakteristik demografis dengan melihat dari tiga dimensi karakteristik *tax evasion* yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Tinjauan empiris yang dijadikan referensi dalam penelitian ini yaitu McGee *et al.*, (2012) yang meneliti etika *tax evasion* di enam negara yaitu Argentina, Guatemala, Polandia, Romania, Inggris, Amerika Serikat.

Selain itu, penelitian McGee, Ho, dan Li (2008) yang meneliti etika *tax evasion* di negara Hongkong dan United State. Sementara itu, penelitian McGee, Aljaaidi, dan Musaibah (2012) yang meneliti tentang etika *tax evasion* dilakukan di Yaman. Selanjutnya, penelitian Sezgin, Yildiz, dan Ayyildiz (2011) yang meneliti etika *tax evasion* di negara Turki dan Kyrgyzhan. Berdasarkan penelitian tersebut, negara Inggris, Amerika Serikat, Hongkong, United State merupakan negara maju. Sementara itu, negara Argentina, Guatemala, Polandia, Romania, Yaman, Turki, dan Kyrgyzhan merupakan negara berkembang (IlmuGeografi.com, 2019).

Menurut Nkundabanyanga *et al.* (2017) mengatakan bahwa wajib pajak negara berkembang lebih rentan melakukan *tax evasion*. Hal ini karena manfaat

yang tidak dirasakan secara langsung, yang disebabkan oleh negara yang masih berkembang dan pembangunan negara yang masih dalam tahap pembangunan. Kemudian pemerintah memaksimalkan pendapatan negara dengan memunculkan peraturan terbaru dalam peraturan perpajakan dengan tujuan agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, wajib pajak merasa sangat dibebankan.

Penelitian Brink dan Porcano (2016) mengatakan bahwa negara maju memiliki tingkat kemakmuran ekonomi yang tinggi sehingga warga negaranya lebih patuh karena merasakan manfaat dari membayar pajak secara langsung. Sementara itu, negara berkembang masih dalam tahap pembangunan yang menyebabkan warga negaranya belum merasakan manfaatnya secara langsung. Mereka berpikir seharusnya pemerintah lebih bisa mengefisienkan dan mengefektifkan pengeluaran negara sehingga warga negara dapat merasakan manfaatnya dengan waktu yang tidak cukup lama.

Keterbaruan penelitian ini yaitu dilakukan di Universitas Brawijaya yang terletak di Malang, Indonesia, karena universitas ini memiliki Program Studi S1 (Sarjana) sekaligus D3 (Vokasi) Perpajakan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu pada Tabel 1 membedakan persepsi mengenai etika *tax evasion* diantara beberapa negara. Sementara itu, penelitian ini ingin mendalami perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan karakteristik demografis, yaitu *gender* dan *education level* dari sudut pandang mahasiswa.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia seperti penelitian Mujiyati, Rohmawati, dan Putri (2017), serta Faradiza (2018) meneliti hubungan

pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda. Sementara itu, penelitian ini menjadikan keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai item untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* dengan menggunakan metode *independent samples t-test*.

Penelitian McGee *et al.* (2012) menggunakan metode *varimax rotation with kaiser*. Sementara itu, penelitian McGee, Aljaaidi, dan Musaibah (2012) menggunakan metode uji beda *wilcoxon*. Penelitian ini menggunakan metode yang berbeda yaitu *independent samples t-test*. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada periode yang berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini dilakukan pada periode akademik tahun 2019/2020.

Teori yang digunakan pun berbeda, karena penelitian terdahulu menggunakan *Social Contract Theory*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori Teleologi. Penelitian ini memilih teori Teleologi dibandingkan dengan *Social Contract Theory* karena teori Teleologi lebih membahas mengenai etika. Hal ini sesuai tujuan penelitian ini yang meneliti mengenai etika *tax evasion*. Sementara itu, *Social Contract Theory* lebih membahas mengenai perjanjian yang dibuat oleh masyarakat dengan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan dengan menyerahkan kebebasan dan hak mereka kepada pemerintah (Wijaya, 2016).

Selain itu, teori Teleologi lebih relevan dengan fenomena yang terjadi saat ini jika dibandingkan dengan teori *Social Contract Theory*. Fenomena yang dimaksudkan yaitu seperti korupsi yang dilakukan oleh para petinggi, sistem

perpajakan yang tidak adil, dan sebagainya. Hal tersebut tidak sesuai dengan *Social Contact Theory* yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan penyerahan hak dan kebebasan masyarakat (Wijaya, 2016). Fenomena-fenomena itu lebih mendekati dengan teori Teleologi karena dengan teori ini sebuah tindakan dianggap etis atau wajar dilakukan jika memberikan manfaat yang besar untuk banyak orang (utilitarianisme). Jadi, ketika tindakan yang dilakukan pemerintah merugikan banyak pihak seperti masyarakat yang dirugikan karena tindakan korupsi para petinggi dan sistem perpajakan tidak adil yang mengurangi kesejahteraan masyarakat, maka mereka akan mencari manfaat untuk diri mereka sendiri dengan melakukan *tax evasion* (egoisme etis).

Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metodelogi	GAP
1	McGee, Nickerson, Pleshko, dan Broihahn (2012) <i>The Ethics of Tax Evasion: An Investigation Into Demographic Differences</i>	<u>Variabel Independen:</u> a. <i>Gender:</i> - Perempuan - Laki-laki b. <i>Country:</i> - Argentina - Guatemala - Polandia - Romania - UK - USA c. <i>Education Level</i> - <i>undergraduate</i> - <i>graduate</i> <u>Variabel Dependen:</u> Persepsi etika <i>tax evasion</i>	<u>Metode Analisis:</u> <i>Varimax Rotation with Kaiser</i> <u>Populasi:</u> Mahasiswa di negara Argentina, Guatemala, Poland, Romania, UK, dan USA <u>Sampel:</u> - <u>Lokasi:</u> Argentina, Guatemala,	1. Penelitian ini menggunakan <i>independent samples t-test</i> sedangkan penelitian terdahulu menggunakan <i>varimax rotation with kaiser</i> . 2. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Argentina, Guatemala, Polandia, Romania, UK, dan USA sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia

(Lanjutan Tabel 1)

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metodelogi	GAP
			Poland, Romania, UK, dan USA	
2	McGee, Ho, dan Li (2008) A Comparative Study On Perceived Ethics of Tax Evasion: HongKong Vs The United States	<u>Variabel Independen:</u> a. <i>Education Major</i> <u>Variabel Dependen:</u> Persepsi etika <i>tax evasion</i>	<u>Metode Analisis:</u> <i>Independent Sample t-Test</i> <u>Populasi:</u> Mahasiswa Universitas HongKong Baptist dan mahasiswa Universitas Barry <u>Sampel:</u> 173 responden <u>Lokasi:</u> Hongkong dan United Kingdom	1. Penelitian ini menggunakan karakteristik demografis sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan karakteristik demografis. 2. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Hongkong dan Barry sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia.
3	McGee, Aljaaidi, dan Musaibah (2012) <i>The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yemen</i>	<u>Variabel independen:</u> a. <i>Marital statues:</i> - <i>single</i> - <i>married</i> b. <i>Level of study</i> - <i>Freshmen</i> - <i>Sophomre</i> - <i>Junior</i> - <i>Senior</i> c. <i>Major of study</i> - <i>Accounting</i> - <i>Business Administration</i> - <i>Finance and banking</i>	<u>Metode Analisis:</u> Uji Beda <i>Wilcoxon</i> <u>Populasi:</u> Mahasiswa Universitas Hadhramo di Yaman <u>Sampel:</u> 124 responden <u>Lokasi:</u> Yaman	1. Penelitian ini menggunakan <i>independent samples t-test</i> sedangkan penelitian terdahulu menggunakan uji beda wilcoxon. 2. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Yaman sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia.

(Lanjutan Tabel 1)

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metodelogi	GAP
		<u>Variabel Dependen:</u> Persepsi etika <i>tax evasion</i>		
4.	Sezgin, Yildiz, dan Ayyildiz (2011) <i>The Ethics of Tax Evasion: A Comparative Study of Turkey and Kyrgyzstan</i>	<u>Variabel Independen:</u> a. <i>Gender</i> - Perempuan - Laki-laki <u>Variabel Dependen:</u> Persepsi etika <i>tax evasion</i>	<u>Metode Analisis:</u> <i>Independent Sample t-Test</i> <u>Populasi:</u> Mahasiswa Turki dan mahasiswa Kyrgyzstan <u>Sampel:</u> 504 responden <u>Lokasi:</u> Turki dan Kyrgyzstan	1. Penelitian ini menggunakan karakteristik demografis yaitu <i>gender</i> , suku bangsa, dan <i>education level</i> . Sementara itu penelitian terdahulu hanya menggunakan <i>gender</i> . 2. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Turki dan Kyrgyzstan sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia
5.	Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati, dan Wahyu Hening Ririn P. (2017) Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	<u>Variabel independen:</u> a. Keadilan Pajak b. Sistem Perpajakan c. Diskriminasi d. Kualitas Pelayanan e. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan <u>Variabel Dependen:</u> Persepsi etika <i>tax evasion</i>	<u>Metode Analisis:</u> Analisis Regresi Berganda <u>Populasi:</u> Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhamma diyah Surakarta <u>Sampel:</u> 84 dosen dan 100 mahasiswa <u>Lokasi:</u> Surakarta	1. Penelitian terdahulu meneliti hubungan pengaruh antara keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan penelitian ini menjadikan keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai item untuk mengukur perbedaan persepsi mengenai etika <i>tax evasion</i> berdasarkan karakteristik demografis.

(Lanjutan Tabel 1)

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metodelogi	GAP
				<p>2. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan independent samples t-test.</p> <p>3. Penelitian terdahulu dilakukan di Surakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Malang.</p>
6.	<p>Sekar Akrom Faradiza (2018)</p> <p>Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak</p>	<p><u>Variabel independen:</u></p> <p>a. Keadilan Pajak b. Sistem Perpajakan c. Diskriminasi</p> <p><u>Variabel Dependen:</u></p> <p>Persepsi etika penggelapan pajak</p>	<p><u>Metode Analisis:</u></p> <p>Analisis Regresi Berganda</p> <p><u>Populasi:</u></p> <p>Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan KPP Yogyakarta</p> <p><u>Sampel:</u></p> <p>186 responden</p> <p><u>Lokasi:</u></p> <p>Yogyakarta</p>	<p>1. Penelitian terdahulu meneliti hubungan pengaruh antara keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan penelitian ini menjadikan keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai item untuk mengukur perbedaan persepsi mengenai etika <i>tax evasion</i> berdasarkan karakteristik demografis.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan <i>independent samples t-test</i>.</p>

(Lanjutan Tabel 1)

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metodelogi	GAP
				<p>3. Penelitian terdahulu dilakukan di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Malang.</p> <p>4. Penelitian terdahulu populasinya wajib pajak orang pribadi dan badan, sedangkan penelitian ini populasinya mahasiswa.</p>
7.	<p>Fadi Alasfour, Martin Samy dan Roberta Bampton (2017)</p> <p><i>The Determinants Of Tax Morale And Tax Compliance: Evidence From Jordan</i></p>	<p><u>Variabel independen:</u></p> <p>a. <i>Gender</i></p> <p>b. <i>Age</i></p> <p>c. <i>Education Level</i></p> <p><u>Variabel Dependen:</u></p> <p><i>Tax Compliance</i></p> <p><u>Variabel Mediasi:</u></p> <p><i>Tax Morale</i></p>	<p><u>Metode Analisis:</u></p> <p><i>Path Analysis</i></p> <p><u>Populasi:</u></p> <p>Mahasiswa Jordan</p> <p><u>Sampel:</u></p> <p>458 responden</p> <p><u>Lokasi:</u></p> <p>Jordan, Malaysia</p>	<p>1. Penelitian terdahulu dilakukan di negara Malaysia sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia.</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan independent samples t-test sedangkan penelitian terdahulu menggunakan path analisis.</p>

Sumber: Data diolah, 2019.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Teleologi

Teori Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “telos” yang berarti tujuan, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan tersebut serta berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari

tindakan tersebut dan “logos” yang berarti ilmu atau teori (Prihanto, 2018:36). Sementara itu, menurut Pratley (1997:173), teori Teleologi menilai suatu tindakan yang dilakukan baik atau buruk dari sudut sasaran, hasil, tujuan, atau keadaan optimum yang dicapai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori Teleologi ini menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akibat atau tujuan dari tindakan tersebut (Ratnawati *et al.*, 2016:27). Selain itu, Teori Teleologi menjelaskan bahwa seseorang berperilaku benar jika menghasilkan hal-hal yang baik (Yosephus, 2010:22).

Istilah teleologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman pada abad ke-18 yang bernama Christian Wolff. Teori Teleologi adalah sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, tujuan, rancangan, maksud, akhir, sasaran, kecendurung, arah, serta bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Teori ini tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan perbuatan atau tindakan, melainkan lebih kepada tujuan dan akibat dari tindakan tersebut (Prihanto, 2018:36). Teori Teleologi lebih bersifat situasional dan subyektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam sebuah situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut (Keraf, 1998). Demikian juga jika suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh teori Teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik. Kondisi-kondisi khusus tertentu tersebut menyebabkan pendekatan etika teleologi digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan etika utilitarianisme (Prihanto, 2018:36).

Egoisme etis dikenalkan oleh Rachels pada tahun 2004. Adapun yang dimaksud dengan egoisme etis yaitu menilai suatu tindakan baik jika berakibat baik bagi pelakunya. Meskipun bersifat egoistis, tindakan ini dinilai baik secara moral karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya. Sementara itu, menurut Prihanto (2018:37), egoisme etis merupakan perilaku yang dapat diterima tergantung dengan kondisinya. Tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mendatangkan kebahagiaan untuk diri sendiri maka akan dinilai baik secara moral. Sebaliknya, dinilai buruk jika kita membiarkan diri kita menderita dan dirugikan (Ratnawati *et al.*, 2016:28).

Sementara itu, etika utilitarianisme menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya bagi banyak orang (Salam, 1997:77). Etika utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748-1832. Persoalan yang dihadapi oleh Bentham dan orang-orang sezamannya adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan publik diantaranya seperti politik, sosial, ekonomi, dan legal secara moral. Hal tersebut penting karena kebijakan publik sangat mungkin diterima oleh kelompok yang satu, tetapi ditolak oleh kelompok yang lain karena merugikan. Ketika mencari dasar obyektif tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar obyektif itu ditemukan dengan melihat apakah suatu tindakan atau kebijakan publik membawa manfaat atau akibat yang berguna, atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait. Jadi, etika utilitarianisme pada dasarnya menilai secara obyektif, manfaat yang ditimbulkan oleh tindakan atau kebijakan tersebut bagi banyak orang (Dwihantoro, 2013).

Secara lebih rinci, kita dapat merumuskan dasar obyektif tersebut ke dalam tiga kriteria. Kriteria pertama yaitu manfaat, dimana tindakan atau kebijakan itu mendatangkan manfaat tertentu. Jadi, tindakan atau kebijakan baik adalah tindakan atau kebijakan yang menghasilkan hal baik. Sebaliknya, akan dinilai buruk secara moral jika mendatangkan kerugian atau hal buruk. Kriteria kedua yaitu manfaat terbesar, dimana tindakan atau kebijakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar dibandingkan dengan tindakan atau kebijakan alternatif lain, atau dalam situasi dimana semua alternatif yang ada ternyata sama-sama mendatangkan kerugian, tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian kecil.

Kriteria ketiga yaitu manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, suatu tindakan atau kebijakan dinilai baik jika manfaat terbesar yang dihasilkan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang menikmati akibat baik tadi, semakin baik tindakan atau kebijakan tersebut. Maka, diantara tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat, pilih yang manfaatnya terbesar dan diantara yang manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya dinikmati paling banyak orang (Ratnawati *et al.*, 2016:29).

Menurut Ratnawati *et al.* (2016:30) etika utilitarianisme mempunyai tiga keunggulan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kriterianya rasional. Maksudnya, utilitarianisme mendasarkan penilaian dan pertimbangan moral pada kriteria rasional. Ketiga kriteria obyektif utilitarianisme tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, bisa diterima masuk akal oleh siapa saja yang berhadapan dengan dilema dan pilihan moral yang sulit.

Ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam situasi dilematis, kita diberi kriteria rasional dan jelas. Ada pegangan yang membuat kita mengambil keputusan moral secara lebih mudah. Ada dasar rasional mengapa kita memilih alternatif yang satu dan mengabaikan yang lain.

2. Etika utilitarianisme menghargai kebebasan setiap individu dalam menentukan sikap moral, dalam mengambil tindakan dan keputusan. Maksudnya, kita tidak dibebani begitu saja oleh norma dan nilai moral yang sudah umum beraku. Namun, dibiarkan untuk memilih sendiri tindakan yang kita nilai benar berdasarkan ketiga kriteria tersebut. Kita tidak lagi dipaksa untuk sekedar mematuhi norma dan nilai tertentu (yang sesuai dengan norma dan nilai moral tertentu) karena memang tindakan tersebut dalam pertimbangan kita mendatangkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Kita mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri sekaligus mempertanggungjawabkan mengapa kita memilih tindakan tersebut.
3. Unsur positif yang lain adalah bahwa utilitarianisme lebih menguntungkan kepentingan banyak orang daripada kepentingan sendiri atau beberapa orang. Oleh karena itu, utilitarianisme tidak bersifat egoistis. Semakin banyak orang yang memperoleh manfaat dari suatu tindakan atau kebijakan, semakin baik tindakan atau kebijakan tersebut. Utilitarianisme tidak mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Ketiga unggulan ini yang menyebabkan etika utilitarianisme banyak dipakai dalam berbagai tindakan dan kebijakan publik. Idealnya, suatu kebijakan publik membawa manfaat atau menguntungkan bagi semua orang dan pihak terkait. Semua

orang memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dalam beberapa kasus hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Secara moral, suatu kebijakan akan dinilai benar secara moral, kalau memenuhi ketiga kriteria tersebut. Ketika kita tidak bisa memuaskan semua orang, kebijakan tersebut dinilai baik secara moral, karena sebagian besar orang atau pihak diuntungkan dengan kebijakan tersebut.

Hanya saja, etika utilitarianisme pun memiliki kelemahan juga. Sejarahnya, etika utilitarianisme merupakan sebuah teori etika yang sangat populer dan banyak digunakan, tetapi teori tersebut juga dikritik oleh beberapa pihak. Menurut Ratnawati *et al.* (2016:29) kritik-kritik tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kritik yang paling keras adalah utilitarianisme membenarkan ketidakadilan. Maksudnya, dengan membenarkan suatu tindakan atau kebijakan hanya karena membawa manfaat bagi sebagian besar orang, utilitarianisme telah membenarkan tindakan atau kebijakan tersebut merugikan kepentingan sebagian kecil orang yang tidak mendapatkan manfaat dari tindakan atau kebijakan tersebut. Hal tersebut karena hanya segelintir orang yang dirugikannya, dan membawa manfaat untuk banyak orang. Itu merupakan suatu yang yang tidak adil.
2. Manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas, sehingga dalam kenyataan praktis menimbulkan kesulitan. Mirisnya, manfaat tersebut lebih sering dilihat dalam kerangka kuantitas materialistis. Sering kali kita membenarkan suatu tindakan atau kebijakan hanya karena tindakan atau kebijakan itu mendatangkan manfaat material. Manfaat non-material seperti nama baik, hak, kesehatan, dan sebagainya yang tidak diperhitungkan.

3. Sering kali beberapa variabel sulit di kuantifikasi sehingga tidak mudah untuk menentukan manakah manfaat terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Lingkungan hidup, keselamatan kerja, rusaknya hutan, rusaknya terumbu karang, polusi udara, dan sebagainya sulit di kuantifikasi untuk menemukan manfaat terbesar. Etika utilitarianisme dalam hal ini sangat membenarkan pelepasan tanaman transgenik misalnya, hanya karena mendatangkan manfaat ekonomis material yang besar. Selain itu, pengerukan pasir akan dibenarkan karena manfaat ekonomis-material yang besar.
4. Manfaat yang dimaksudkan oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek. Padahal dalam menilai akibat suatu tindakan kita harus melihatnya dalam jangka waktu yang panjang. Ini sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan dibidang lingkungan. Manfaat dan kerugian lingkungan tidak selalu bisa dilihat dan diukur dalam jangka pendek. Apalagi dalam perspektif etika, banyak dampak yang berkaitan dengan nilai moral yang baru bisa dilihat jauh setelah tindakan atau kebijakan dilaksanakan.
5. Etika utilitarianisme tidak menganggap serius nilai suatu tindakan, atau lebih tepat lagi nilai sebuah moral atau kewajiban melainkan hanya memperhatikan akibatnya. Jadi, utilitarianisme sangat mungkin membenarkan peredaran narkoba dan perdagangan perempuan sebagai contoh karena tindakan tersebut mendatangkan manfaat yang besar. Hal tersebut merupakan sebab mengapa Kant beranggapan bahwa akibat menjadi tolak ukur penilaian moral atas suatu tindakan. Universalitas moral akan hilang, karena setiap tindakan mendapat penilaian moral yang berbeda berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Demikian

pula utilitarianisme tidak pernah menganggap serius motivasi yang ada dibalik tindakan tersebut.

6. Seandainya ketiga kriteria tersebut saling bertentangan, akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Misalnya, tindakan A mempunyai manfaat 40%, tetapi dinikmati oleh 60% orang. Tindakan B mempunyai manfaat 60%, tetapi dinikmati oleh 40% orang. Apakah manfaat atau jumlah orang yang menikmati yang harus dipilih.

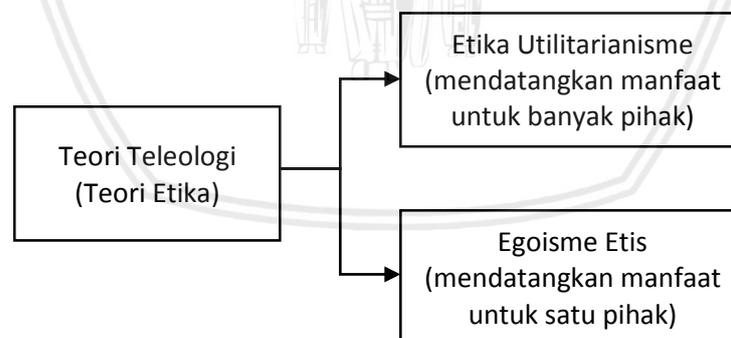
Para filsuf penganut etika utilitarianisme menyadari kelemahan-kelemahan etika ini. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar yang ditawarkan yaitu dengan membedakan dua tingkatan etika utilitarianisme. Kedua tingkatan tersebut yaitu utilitarianisme aturan dan utilitarianisme tindakan. Oleh karena itu, kita harus cek terlebih dahulu apakah kebijakan dan tindakan itu sejalan dengan aturan atau norma moral yang ada atau tidak. Jika tidak sejalan, tindakan atau kebijakan tersebut ditolak, walaupun membawa manfaat yang besar (Ratnawati *et al.*, 2016:31).

Kemudian dalam menilai suatu tindakan dan kebijakan berdasarkan akibatnya. Sebaiknya jangan melihat hanya dari akibat material fisik, melainkan juga perlu memperhitungkan akibat non-material, termasuk kerusakan mental dan moral serta kehancuran lingkungan. Demikian pula manfaat tersebut jangan hanya dilihat dalam jangka waktu pendek, melainkan jangka waktu panjang. Hal tersebut harus dinilai positif dan dipilih agar tindakan dan kebijakan yang membawa manfaat jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang jauh lebih merugikan.

Selanjutnya, dalam kasus ketika kita terpaksa mengambil tindakan dan kebijakan yang tidak bisa menguntungkan semua pihak dan terpaksa karena tidak

ada alternatif lain yang lebih baik mengorbankan kepentingan segelintir orang. Jalan keluar yang baik adalah dengan pendekatan pribadi untuk bisa memberi kesempatan kepada pihak yang dikorbankan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka perlu didengar dan berusaha mencari jalan keluar, termasuk kompensasi yang bisa diterima.

Secara moral kita berusaha memperkecil kerugian material, mental, dan moral yang dialami pihak yang terpaksa dikorbankan. Dengan cara itu, kita telah memenuhi salah satu hukum universal Kant, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat luhur yang tidak boleh diperalat bagi kepentingan orang lain. Jadi, dengan jalan tersebut kita memperlihatkan sikap hormat kita kepada kepentingan mereka yang sesungguhnya tidak ingin kita korbakan, tetapi karena tidak ada cara lain maka dengan sangat terpaksa kita korbakan dengan kompensasi yang memuaskan mereka (Ratnawati *et al.*, 2016:32).



Gambar 1. Teori Teleologi
Sumber: Data diolah, 2019.

2.2.2. Persepsi

Persepsi merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan sekitar kita. Pengenalan atas hal-hal tersebut adalah salah satu fungsi dari fungsi utama proses ini (Kreitner dan

Kinicki, 2014: 185). Menurut Prasetyo (2010), persepsi merupakan pengalaman tentang peristiwa, obyek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sementara itu, dalam psikologi persepsi dapat diartikan sebagai proses perolehan, pemilihan, penafsiran, serta pencarian informasi untuk dipahami dengan menggunakan pengindraan seperti pendengaran, penglihatan, peraba, dan sebagainya (Sarwono, 1999). Selain itu, persepsi juga dapat didefinisikan sebagai gambaran seseorang tentang suatu obyek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi (Tampubolon, 2012: 65).

Menurut Lubis (2010), persepsi merupakan bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan suatu obyek, peristiwa, serta manusia. Definisi persepsi yang formal yaitu proses dimana seseorang berusaha, memilih, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang obyek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi bersifat sangat subyektif dan situasional karena persepsi bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu (Lubis, 2010).

Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat terletak dalam diri individu yang membentuk persepsi tersebut atau dalam diri obyek (target) yang diartikan atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibentuk. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Tampubolon (2012) diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Individu

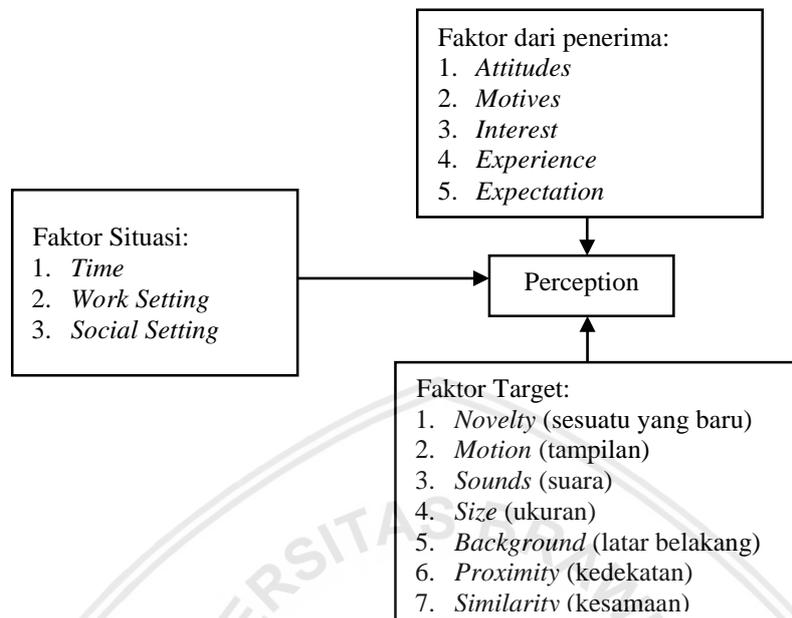
Individu dalam membuat suatu persepsi akan dilatarbelakangi oleh kemampuan individu untuk mempelajari sesuatu (*attitude*), motivasi individu untuk membuat persepsi tentang sesuatu tersebut, kepentingan individu terhadap sesuatu yang dipersepsikan, pengalaman dalam menyusun persepsi, dan harapan individu dalam menentukan persepsi tersebut.

2. Faktor Situasi

Situasi dalam menyusun suatu persepsi ditentukan oleh situasi yang tepat, bangunan atau struktur dari obyek yang dipersepsikan, dan kebiasaan yang berlaku dalam sosial masyarakat dalam merumuskan persepsi.

3. Faktor Target

Gangguan yang ada dalam menyusun persepsi sebagai gangguan dalam menentukan persepsi biasanya adalah obyek yang dipersepsikan yang merupakan suatu perihal yang benar-benar baru (*novelty*), adanya gambaran hidup yang mempengaruhi dalam membentuk persepsi (*motions*), suara-suara yang timbul pada saat membentuk persepsi (*sounds*), ukuran dari bentuk persepsi (*size*) yang melatarbelakangi bentuk persepsi tersebut (*background*), kedekatan persepsi dengan obyek lain yang dapat membentuk persepsi yang hampir sama (*proximity*), dan kesamaan (*similarity*) dari persepsi yang akan dibangun dengan persepsi lain.



Gambar 2. Faktor Persepsi
Sumber: Tampubolon, 2012

2.2.3. Etika

2.2.3.1. Sejarah Etika

Historis etika yang merupakan usaha filsafat lahir dari keambrokan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2.500 tahun yang lalu. Pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya sehingga para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia (Suseno, 1987:4). Pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik ke dalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan mengenai hal tersebut sebagai bagian filsafat yaitu terjadi di Yunani. Kaum Yunani sering mengadakan perjalanan ke luar negeri dan ketika itu mereka menemukan ketertarikan terhadap berbagai macam hukum, kebiasaan, tata kehidupan, dan sebagainya (Poespoprodjo, 1999:18).

Tidak banyak ahli filsafat yang memperhatikan masalah etika sehingga Sophisticians yang merupakan seorang guru yang bijaksana muncul dan merintis ilmu akhlak. Beliau berpendapat bahwa akhlak tidak menjadi benar jika tidak didasarkan dengan ilmu pengetahuan (Ahmadamin, 1975:45). Berabad-abad lamanya pembicaraan mengenai masalah ekonomi dan bisnis, pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara. Selain itu, mereka membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Filsafat dan teologi abad pertengahan pembahasan ini dilanjutkan, dalam kalangan Kristen maupun Islam (Ahmadamin, 1975:47).

Selanjutnya, setelah paham Antisthense pada 444-370 M muncul, Plato (427-437 SM) yang merupakan ahli filsafat Athena dan murid dari Sophisticians memiliki pandangan terhadap paham-paham etis berdasarkan dialog Sokrates. Plato tidak menulis mengenai etika, tetapi buku etika pertama kali ditulis oleh Aristoteles (384 M). Namun, banyak dialog Plato di dalam dialog Sokrates yang bernada mengenai uraian-uraian etika. Plato merekonstruksi pikiran-pikiran tentang hidup yang baik. Etika Plato tidak hanya berpengaruh di barat, melainkan lewat Neoplatoisme yang masuk ke dalam kalangan sufi Islam. Disinilah nantinya jalur hubungan pemikiran filsafat Yunani dengan pemikiran muslim yang mempengaruhi tulisan-tulisannya mengenai filsafat etika. Topik-topik mengenai ekonomi dan perniagaan tidak luput dari perhatian filsafat di zaman modern (Bertens, 2000:37). Zaman modern ini memunculkan pola etika seperti otonomi kesadaran Kant (Ahmadamin, 1975:48).

Beberapa waktu kemudian, Epikuros (314 M) yang merupakan tokoh yang berpengaruh dalam filsafat etika, mendirikan sekolah filsafat Yunani setelah Aristoteles. Berbeda dengan sebelumnya, ciri khas dari filsafat Epikuros yaitu penarikan diri dari hidup damai. Etika Epukuros bersifat privatistik. Teori-teori etika berkembang hingga saat ini (Ahmadamin, 1975:50).

2.2.3.2. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu “ethos” yang diartikan identik dengan moral atau moralitas dan dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk, serta benar atau salah (Agoes, 2012). Pengertian etika ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Istilah etika sangat berhubungan dengan tata krama, sopan santun, norma susila, pedoman moral, dan sebagainya. Hal-hal tersebut berhubungan juga dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Menurut Keraf (1998), etika berkaitan dengan nilai-nilai, aturan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain.

Selain itu, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Selain itu, etika juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Adapun fungsi utama etika yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa

etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, tetapi suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis (Supriadi, 2006: 7-12).

Secara garis besar, menurut Tedjosaputro (2003: 30-31), etika dapat dikaji setidaknya dengan tiga aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Normatif

Aspek normatif merupakan aspek yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk memengaruhi perilaku, keputusan, kebijakan, karakter individu, serta struktur sosial. Aspek ini diharapkan individu dapat berperilaku dengan segala unsurnya berpijak pada norma-norma, baik norma-norma kehidupan bersama ataupun norma-norma moral yang diatur dalam standar profesi. Hal ini digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan utama etika itu sendiri, yaitu menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari individu dan masyarakat. Jadi, sasaran praktis dari aspek normatif yaitu untuk memberikan evaluasi berdasarkan penalaran atas perilaku dan karakter individu, berfungsinya organisasi-organisasi dan respons-respons alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalah konkret.

2. Aspek Konseptual

Aspek konseptual diarahkan pada penjernihan konsep-konsep atau ide-ide dasar, *problem-problem*, prinsip-prinsip, dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Aspek konseptual ini mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri. Aspek ini diharapkan

dapat mengembangkan nilai-nilai etis yang telah diatur dalam wadah kode etik oleh para anggotanya. Pengembangan tersebut tidak hanya dengan mematuhi, memahami, dan melaksanakan standar-standar etika profesi, tetapi juga mencoba menemukan nilai-nilai moral yang ada dan berkembang di masyarakat.

3. Aspek Deskriptif

Aspek deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur konseptual dan normatif. Aspek deskriptif akan memberikan informasi-informasi tentang fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi itu sendiri sehingga penanganan aspek normatif dan konseptual dapat segera direalisasikan.

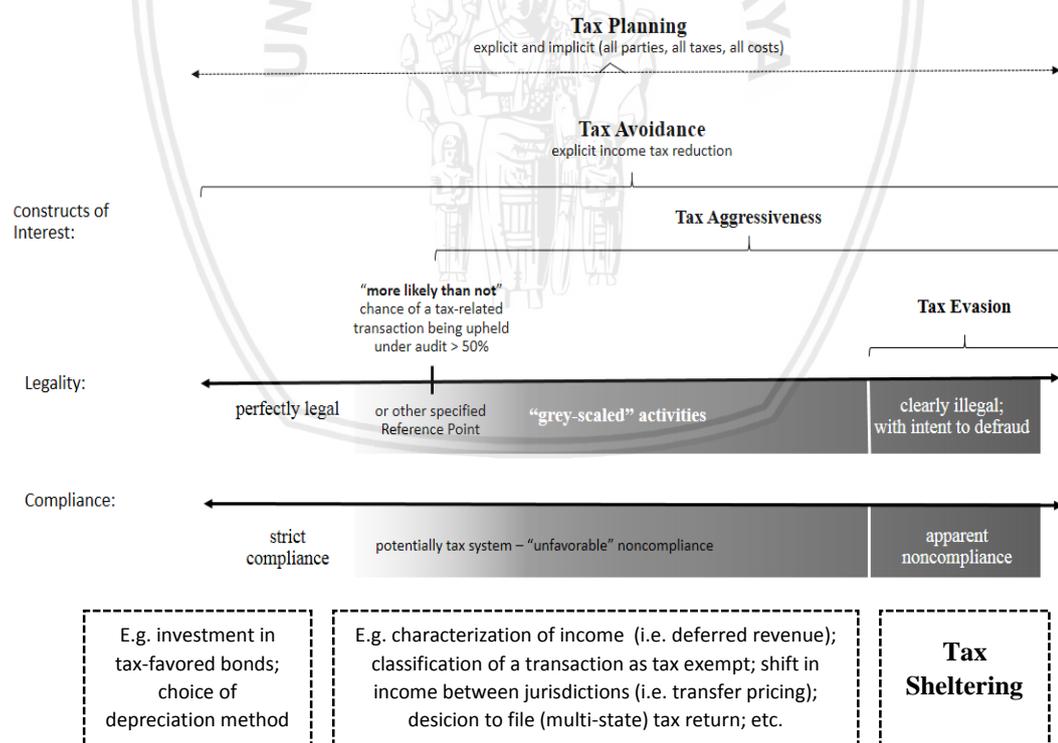
2.2.4. Tax Evasion

Tax evasion merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terhutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2013:23). Selain itu *tax evasion* juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi ataupun menghapus pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2007). Selanjutnya, *tax evasion* juga dapat diartikan sebagai tindakan yang meringankan beban pajak wajib pajak dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menghambat penerimaan negara (Xynas, 2011).

Cara ini tidak aman dilakukan oleh wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam ruang lingkup undang-undang dan peraturan perpajakan. *Tax evasion* berpotensi untuk dikenai sanksi pelanggaran hukum tindak

pidana fiskal. Usaha wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* merupakan perlawanan pajak secara aktif. Perlawanan aktif merupakan usaha nyata dari wajib pajak untuk menghindari pajak yang terhutang dengan berbagai cara (Pohan, 2013:14).

Tax evasion beresiko tinggi dan berpotensi untuk dikenai sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal itu, didukung dengan penelitian Lietz (2013) yang mengatakan bahwa *tax evasion* memiliki tingkat ilegalitas dan ketidakpatuhan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan *tax avoidance* dan *tax aggressiveness*. Berikut ini merupakan tingkat kepatuhan dan ilegalitas dari *tax avoidance*, *tax aggressiveness*, dan *tax evasion*:



Gambar 3. *Unifying Conceptual Framework of Corporate Tax Planning*
Sumber: Lietz, 2013.

Oleh sebab itu, sebagai *tax planner* yang baik maka cara ini pastinya tidak direkomendasikan untuk digunakan (Pohan, 2013: 23). Menurut Zain (2007:51), *tax evasion* merupakan suatu kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

1. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung adanya.
3. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa atau melakukan dengan sengaja melakukan *tax evasion* serta menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

2.2.5. Persepsi mengenai Etika *Tax Evasion*

Martin Crowe seorang *catholic priest* pada tahun 1944 menulis sebuah *doctoral dissertation* yang berjudul *The Moral Obligation of Paying Just Taxes*. Disertasinya meringkas dan menganalisis perdebatan mengenai topik tersebut secara teologi dan filsafat yang sudah terjadi selama 500 tahun yang banyak ditulis dalam bahasa latin dimana etika *tax evasion* dapat diuji dari beberapa perspektif, salah satunya agama. Satu pendekatan digunakan untuk menguji hubungan antara individu dengan negara, pendekatan lain menguji hubungan antara individu dengan anggota masyarakat sesama pembayar pajak, dan hubungan antara individu dengan Tuhan (McGee, 2006). Crowe mengidentifikasi tiga pandangan utama terhadap

etika *tax evasion* yang sudah muncul selama beberapa abad. Ketiga pandangan tersebut yaitu tidak pernah etis, kadang-kadang etis, dan selalu etis. Menurut McGee (2006), persepsi mengenai etika *tax evasion* merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis, etis, ataupun terkadang etis yang dilihat dari situasi atau kondisi sekitar yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi yang merupakan dimensi karakteristik *tax evasion*. Jadi, persepsi mengenai etika *tax evasion* merupakan pandangan individu terhadap tindakan *tax evasion* yang didukung dengan situasi sekitar sehingga individu dapat memberikan pandangan bahwa *tax evasion* merupakan suatu tindakan yang tidak etis, etis, atau terkadang etis.

Mahasiswa ketika berpersepsi bahwa *tax evasion* merupakan suatu tindakan yang etis, kadang-kadang etis, atau tidak etis didasarkan berdasarkan tiga pandangan dimensi karakteristik *tax evasion* itu sendiri yang terdiri dari keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Pandangan dimensi karakteristik *tax evasion* tersebut diantaranya yaitu:

1. Keadilan Pajak

Keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang (KBBI Daring, 2016). Pemungutan pajak memiliki empat standar dalam melaksanakannya yaitu dapat meningkatkan pendapatan atau penerimaan pemerintah yang diperlukan, pengelolaannya mudah untuk pemerintah dan mudah bagi orang untuk membayar, efisien dalam ekonomi, dan harus adil. Salah satu standar yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu adil (Burton, 2014: 124). Prinsip yang paling

utama dalam melakukan pemungutan pajak yaitu keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, semaksimal mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara (Zain, 2007: 34).

Keadilan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Keadilan pajak dapat terwujud jika manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak harus sesuai dengan manfaat yang diperolehnya atas jasa-jasa pemerintah. Jasa-jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siringoringo, 2018). Hal tersebut berhubungan dengan keefisienan pemerintah dalam pengeluaran negaranya, serta penggunaan dana untuk proyek-proyek yang layak untuk dibiayai (McGee, Aljaaidi, dan Anwar, 2012). Menurut Siahaan (2010) membagi keadilan pajak ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil jika kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah tersebut meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil juga dapat dilihat dari struktur pengeluaran pemerintah tersebut.

b. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu namun setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

c. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

- 1) Keadilan Horizontal dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.
- 2) Keadilan Vertikal dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Keadilan pajak sangatlah penting karena hal tersebut akan mengarah pada sikap wajib pajak yang lebih baik. Ketika perlakuan pemerintah baik kepada wajib pajak dengan memberikan kesejahteraan terhadap semua wajib pajak, maka mereka akan merasa puas sehingga mendorong wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak yang dibebankan kepada mereka (Azmi dan Perumal, 2011). Cara mewujudkan keadilan pajak menurut Azmi dan Perumal (2011) yaitu pemerintah harus memperhatikan tiga aspek keadilan dalam penerapan pajak di dalam suatu negara, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan Undang-Undang Perpajakan yang kemudian akan diberlakukan masyarakat dapat membuat mereka melihat apakah pemerintah juga mengakomodasikan kepentingan wajib pajak dalam penerepan peraturan tersebut seperti obyek pajak, sanksi pajak, dan lain sebagainya. Undang-Undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah dengan mengakomodir perkembangan masyarakat akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak. Hal tersebut karena mereka diperlakukan adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan pajak yang akan membebani wajib pajak. Berdasarkan hal ini, mereka dapat menilai apakah suatu Undang-Undang Perpajakan mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Perpajakan yang bersangkutan.

b. Keadilan dalam Penerapan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk memungut pajak dari masyarakat. Keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk keadilan di dalam penerapan hukum pajak. Hal tersebut karena dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dengan memerhatikan kepentingan wajib pajak.

c. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak berkaitan dengan manfaat dari pemungutan pajak tersebut yang akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena ketika wajib pajak membayar pajak, maka mereka harus menerima imbalan atau manfaat dari apa yang mereka bayarkan. Manfaat atau imbalan pajak tersebut dapat berupa pelayanan umum dan kesejahteraan umum yang harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.

2. Sistem Perpajakan

Sistem berasal dari bahasa latin *systema* yang mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya yaitu seperangkat prinsip, fakta, peraturan, dan lainnya. Diklasifikasikan atau diatur dalam bentuk reguler dan teratur sehingga dapat menunjukkan rencana logis yang menghubungkan berbagai bagian (Nurmantu, 2005: 105). Sebuah masyarakat terdiri dari suprasistem, sistem, dan subsistem. Jika ditinjau dari perpajakan, maka perpajakan di Indonesia adalah suprasistem, pajak penghasilan adalah sistem, dan pajak penghasilan atas karyawan adalah subsistem (Nurmantu, 2005: 105).

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. *Tax administration* selanjutnya dirinci menjadi *the institution* (lembaga), *the person who work there* (para pegawai) dan *the procedure* (prosedur perpajakan). Sistem perpajakan dapat disebut sebagai suatu cara atau metode yang menjelaskan bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara (Nurmantu, 2005: 106). Berdasarkan

beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah seperangkat prinsip, aturan yang diterapkan secara teratur untuk mempermudah dalam proses pemungutan pajak. Selain itu, sistem perpajakan dapat diartikan juga sebagai metode yang digunakan untuk mengelola pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan merupakan salah satu hal yang penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Seiring dengan berjalannya waktu, munculah reformasi di bidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu Indonesia mulai menerapkan self assessment system. Sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Sementara itu, aparat pajak hanya membimbing serta mengawasi wajib pajak (Suminarsasi, Wahyu, dan Supriyadi, 2011). Pengenaan tarif pajak dikenakan atas penghasilan wajib pajak yang akan diperhitungkan oleh wajib pajak haruslah bersifat adil, karena jika sistem pajak tidak adil maka akan mempengaruhi persepsi mereka atas etika tax evasion (Yee, Moorthy, dan Soon, 2017). Menurut Adam Smith sistem perpajakan haruslah dilaksanakan berdasarkan beberapa kriteria Zain (2007), yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan (*equity*)

Hal ini berkaitan dengan keadilan pendistribusian pajak dari berbagai kalangan.

b. Kepastian (*certainly*)

Pajak tidak boleh dilakukan dengan kesewenangan dan ketidakpastian. Hal tersebut harus memiliki kepastian.

c. *Convenience*

Hal ini berkaitan dengan cara pembayaran pajak. Kapan wajib pajak harus membayar pajak, sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan wajib pajak harus merasa membayar pajak adalah sebagai tanggung jawab mereka.

d. *Economy*

Adapun yang dimaksud dengan *economy* pada hal ini yaitu biaya pemungutan yang kecil dibandingkan secara proposional dengan peningkatan penerimaan dan menghindari efek distorsi perilaku wajib pajak.

Sementara itu, menurut Sommerfeld (1982:30), rangka mendesain suatu sistem perpajakan harus sesuai kriteria yang tidak sebatas dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Sommerfeld (1982:30) menambahkan kriteria tersebut dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. *Productivity*

Productivity merupakan besar jumlah pajak yang dapat dihasilkan yang menjadi sorotan para politikus untuk mengevaluasi kinerja pemerintah tanpa mempersoalkan apakah itu memenuhi persyaratan atau tidak.

b. *Visibility*

Visibility memiliki sifat ukuran yang dipakai oleh wajib pajak. Seberapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran pajaknya yang

seringkali dieksploitir oleh para politikus untuk menabur janji-janji peningkatan kesejahteraan dibanding dengan bagaimana cara agar meningkatkan penerimaan pajak.

c. *Political Considerations*

Hal ini lebih mencerminkan bagaimana para anggota perwakilan rakyat melobi dan melakukan pendekatan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menguntungkan kelompoknya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3), mengatakan bahwa diskriminasi merupakan setiap pelecehan, pembatasan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung. Hal ini didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ras, suku, kelompok, etnik, status sosial, golongan, status ekonomi, bahasa, jenis kelamin, serta keyakinan politik yang menyebabkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif pada bidang ekonomi politik, sosial, hukum, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang diterapkan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain ada yang merasa dirugikan. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak seperti peraturan perpajakan yang menguntungkan golongan tertentu dan merugikan golongan lainnya, maka wajib pajak akan tergerak untuk melakukan tax evasion dan menganggap hal tersebut etis untuk dilakukan (Widjaja, Lambey, dan Walandouw, 2017). Salah satu peraturan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat yang sifatnya wajib dijadikan sebagai pengurang pajak dari penghasilan bruto (Indriyani, Nurlaela, dan Wahyuningsih, 2016). Peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak dari penghasilan bruto. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai

bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan (Fatimah dan Wardani, 2017).

2.2.6. Karakteristik Demografis

2.2.6.1. Gender

Secara umum *gender* dapat didefinisikan sebagai perbedaan kedudukan, peran, serta sifat yang dilekatkan pada kaum wanita maupun pria melalui konstruksi secara sosial maupun kultural (Nurhaeni, 2009). Menurut Oakley (1972), perbedaan tersebut bukan kodrat dan bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural. Selanjutnya, dikemukakan oleh Hasples dan Suriyasarn (2005) yang mengatakan bahwa *gender* merupakan sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan wanita dan pria yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kebutuhan, peran, serta peluang dan hambatan.

Pandangan tentang *gender* menurut Samekto (1999), diklasifikasikan menjadi dua model diantaranya yaitu:

1. Equity Model

Asumsi yang mendasari model ini yaitu wanita dan pria sebagai profesional adalah identik, sehingga perlu satu cara yang sama dalam mengelola. Selanjutnya, wanita harus diberi akses yang sama dan saling melengkapi.

2. Sex Role Stereotypes Model

Asumsi model ini menyatakan bahwa wanita dan pria mempunyai kemauan yang berbeda, sehingga perlu adanya perbedaan dalam mengelolanya. Klasifikasi *stereotypes* merupakan suatu proses pengelompokan individu ke dalam satu kelompok dan pemberian atribut karakteristik pada individu berdasarkan

kelompok. *Sex role stereotypes* dihubungkan dengan pandangan umum bahwa pria lebih berorientasi pada pekerjaan, objektif, agresif, independen, dan memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan wanita dalam pertanggungjawaban manajerial. Wanita dilain pihak dipandang lebih pasif, berorientasi pada pertimbangan, lembut, dan lebih sensitif dibanding dengan pria (Reed *et al.*, 1994).

2.2.6.2. Education Level

Education level atau tingkat pendidikan pada umumnya dianggap dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian individu. Hal-hal yang melekat pada diri orang tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Makin tinggi nilai aset maka makin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. Produktivitas mereka ditunjang oleh pendidikan (Sumarsono, 2008: 10). Oleh karena itu, persepsi individu tergantung pada *education level* karena pola pikir yang berbeda sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Jenjang pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia yang dipakai oleh Biro Pusat Statistik diantaranya yaitu sebagai berikut:

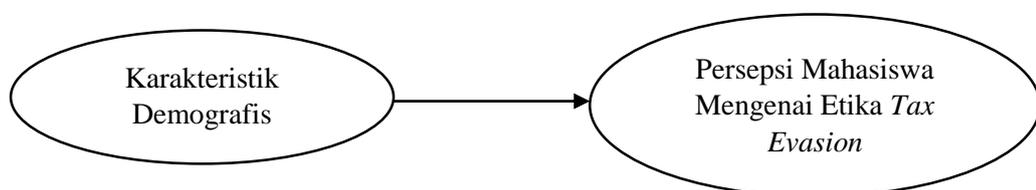
1. Program diploma I (D1)
2. Program diploma II (D2)
3. Program diploma III (D3)
4. Sarjana (S1)
5. Magister (S2)
6. Doktor (S3)

2.3. Model Konsep dan Hipotesis

2.3.1. Model Konsep

Model konseptual adalah pemikiran yang mengacu pada pokok rumusan masalah atau permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Rumusan masalah atau permasalahan tersebut yaitu perbedaan persepsi mahasiswa atas etika *tax evasion* berdasarkan karakteristik demografis yaitu *gender* dan *education level*. Praktik *tax evasion* merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Semakin banyak yang melakukan *tax evasion*, maka semakin sedikit penerimaan pajak yang diterima. Oleh karena itu, target penerimaan pajak pun tidak tercapai dan pembangunan negara dapat terhambat.

Tax evasion harus diminimalisir agar pendapatan pajak meningkat dan tercapai. Caranya yaitu memperhatikan faktor-faktor *tax evasion* dari karakteristik dimensi *tax evasion* seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi sehingga persepsi yang mereka bentuk terhadap persepsi etika *tax evasion* baik. Berdasarkan uraian diatas, maka model konsep dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. Model Konsep
Sumber: Data diolah, 2019

2.3.2. Model dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Model hipotesis didasarkan pada tinjauan empiris dan tinjauan teoritis yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini (Suriasumantri, 2003:47). Berdasarkan hasil tinjauan empiris serta tinjauan teoritis pada bab sebelumnya, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya

Persepsi mengenai etika *tax evasion* merupakan sebuah pemikiran individu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mempengaruhi persepsi individu mengenai etika *tax evasion*. Beberapa faktor seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan lain sebagainya, menyebabkan persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* menjadi berbeda-beda. Perbedaan persepsi tersebut yaitu pada pandangan individu terhadap etika *tax evasion* yang menganggapnya sebagai tindakan yang etis, tidak etis, atau terkadang etis. Jika mahasiswa melihat banyak orang yang dirugikan, salah satunya karena sistem perpajakan yang tidak adil, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan etika utilitarianisme pada teori Teleologi. Hal ini karena tidak membawa manfaat untuk banyak orang dan malah membawa kerugian untuk banyak orang. Jadi, mereka akan berpersepsi mengenai etika *tax evasion* bahwa tindakan tersebut etis dilakukan jika dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu, ketika mahasiswa tersebut menjadi wajib pajak, mereka akan cenderung melakukan *tax evasion* yang menguntungkan dirinya sendiri (egoisme etis) (Ratnawati *et al.*, 2016:27).

Secara umum *gender* dapat didefinisikan sebagai perbedaan kedudukan, peran, serta sifat yang dilekatkan pada kaum wanita maupun pria melalui konstruksi secara sosial maupun kultural (Nurhaeni, 2009). Wanita cenderung dianggap lebih mematuhi peraturan dibandingkan dengan pria, sehingga pria kemungkinan ketidapatuhannya lebih besar jika dibandingkan dengan wanita (Alasfour, Samy, dan Bampton, 2016). Menurut penelitian McGee *et al.* (2012) dan Sezgin, Yildiz, dan Ayyildiz (2011), persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* memiliki perbedaan antara pria dan wanita berdasarkan karakteristik dimensi *tax evasion* yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan wanita dianggap lebih sensitif dan cenderung patuh akan peraturan dibandingkan dengan pria.

Sementara itu, penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016) mengatakan bahwa *gender* tidak mempengaruhi persepsi mengenai etika *tax evasion* secara signifikan. Wanita memiliki nilai moral yang tinggi jika dibandingkan dengan pria, akan tetapi terdapat beberapa pria yang lebih bermoral jika dibandingkan dengan wanita. Ketika pria dan wanita memiliki perbedaan moral, sifat, peran yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka, maka secara tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi persepsi mereka mengenai etika *tax evasion* karena perilaku kepatuhan mereka diawali dengan persepsi mereka terhadap *tax evasion*. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* karena berdasarkan sifat dasar yang dimiliki pria dan wanita, mereka akan berpersepsi bahwa etika dapat dikatakan etis, tidak etis, maupun terkadang etis tergantung dengan kondisi masing-masing. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka

hipotesis berikut dikembangkan untuk menguji perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* antara pria dan wanita diduga bahwa:

H₁ : Ada perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya.

2. Perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *education level* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya

Beberapa faktor seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* (McGee, 2006). Hal ini menyebabkan persepsi yang merupakan pemikiran seorang individu terhadap suatu obyek menjadi berbeda-beda. Perbedaan persepsi tersebut yaitu pada pandangan individu terhadap etika *tax evasion* yang menganggapnya sebagai tindakan yang etis, tidak etis, atau terkadang etis. Salah satu contohnya yaitu jika sistem perpajakan tidak adil dan merugikan banyak pihak, maka mahasiswa kemungkinan cenderung menganggap bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan teori Teleologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan etis jika memberikan manfaat yang besar untuk banyak pihak (utilitarianisme). Jika mahasiswa memandang dengan membayar pajak tidak mendapatkan manfaat dan hanya mendapatkan kerugian, maka mahasiswa tersebut ketika nantinya menjadi wajib pajak kemungkinan akan cenderung melakukan *tax evasion*. Hal ini karena mereka menganggap *tax evasion* etis untuk dilakukan karena menguntungkan untuk diri mereka (egoisme etis) (Ratnawati *et al.*, 2016:27).

Education level atau tingkat pendidikan pada umumnya dianggap dapat mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian individu. Hal-hal yang melekat pada diri orang tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Makin tinggi nilai aset maka makin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. Produktivitas mereka ditunjang oleh pendidikan (Sumarsono, 2008: 10). Jadi, persepsi individu tergantung pada *education level* karena pola pikir yang berbeda sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka dapatkan.

Menurut McGee *et al.* (2012) mengatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* salah satunya yaitu antara mahasiswa *undergraduate* dan *graduate*. Penelitian itu sejalan dengan penelitian McGee, Aljaaidi, dan Musaibah (2012) dan McGee, Ho, dan Li (2008) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika *tax evasion* berdasarkan tingkat studi dan jurusan. Sementara itu, penelitian McGee (2012) mengatakan bahwa persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *education level* tidak signifikan.

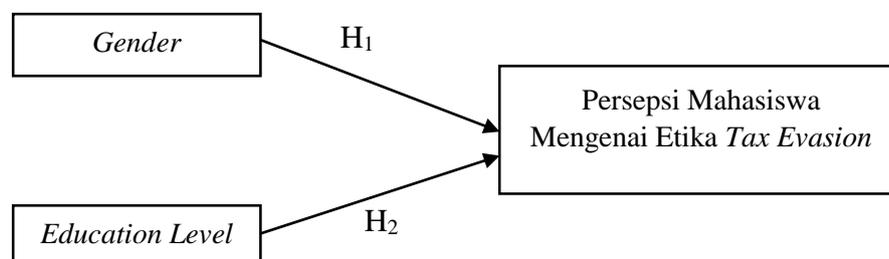
Penelitian ini membagi *education level* menjadi dua, yaitu mahasiswa D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana). Hal itu dilakukan karena kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa D3 (Vokasi) lebih mengarah ke praktik perpajakannya, sedangkan mahasiswa S1 (Sarjana) lebih mengarah ke teori perpajakannya. Ketika mahasiswa dihadapkan dengan situasi yang mendukung untuk melakukan penghindaran pajak, mahasiswa yang memiliki pengetahuan perpajakannya belum begitu luas (hanya mengetahui permukaannya saja yaitu praktik perpajakannya

saja), kemungkinan akan cenderung memilih untuk melakukan *tax evasion* karena menganggapnya sebagai sesuatu yang etis (Alasfour, Samy, dan Bampton, 2016).

Sementara itu, ketika mahasiswa memiliki pengetahuan perpajakan yang luas (tidak hanya praktiknya melainkan teorinya secara mendalam) maka mahasiswa akan menemukan celah yang nantinya akan dimanfaatkan sehingga mahasiswa itu cenderung menganggap *tax evasion* sebagai sesuatu yang tidak etis dan menghindari pajak dengan cara yang legal (Alasfour, Samy, dan Bampton, 2016). Jika dilihat dari *education level* dengan tingkat pengetahuan yang berbeda maka diduga terdapat perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* yaitu etis, tidak etis, ataupun terkadang etis. Oleh karena itu, hipotesis berikut dikembangkan untuk menguji perbedaan persepsi atas etika *tax evasion* antara mahasiswa D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya berdasarkan karakteristik dimensi *tax evasion* diduga bahwa:

H₂ : Ada perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *education level* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya.

Berdasarkan perumusan hipotesis yang telah dijelaskan, model hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 5. Model Hipotesis
Sumber: Data diolah, 2019

Keterangan :

H₁ : Ada perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya berdasarkan *gender*.

H₂ : Ada perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya berdasarkan *education level*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Menurut Sekaran (2006:49), jenis penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabel satu dengan variabel yang lainnya atau variabel satu dengan standar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif karena sesuai dengan tujuan pada penelitian ini. Adapun tujuan tersebut yaitu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender* dan *education level* pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Indonesia yaitu Universitas Brawijaya Malang. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena hanya Universitas Brawijaya Malang yang memiliki program studi Perpajakan baik D3 (Vokasi) maupun S1 (Sarjana) di kota Malang. Selain itu, program studi Perpajakan di Universitas Brawijaya Malang juga telah terakreditasi oleh BAN-PT.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang ditetapkan oleh peneliti yang dapat berbentuk apa saja untuk dipelajari, sehingga akan diperoleh informasi mengenai hal tersebut dan kemudian akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:38). Variabel dapat membantu penelitian karena hal tersebut merupakan mediator antara konsep dengan fenomena (Indriantoro dan Supomo, 2011:61). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang mendapat pengaruh atau menjadi akibat dari variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* (PERCEPTION).

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau akibat (Sugiyono, 2016:39). Variabel independen dapat disebut juga sebagai variabel bebas, predictor, antecedant, ataupun stimulus. Penelitian ini menggunakan karakteristik demografis yaitu *gender* (GENDER) dan *education level* (EDLEV) sebagai variabel independen yang dipergunakan sebagai pembeda atas persepsi mengenai etika *tax evasion* (PERCEPTION).

3.3.2. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.3.2.1. *Gender*

Gender (GENDER) merupakan penggolongan gramatikal terhadap kata benda yang secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin atau kenetralan. Selain itu, *gender* (GENDER) secara umum dapat didefinisikan juga sebagai perbedaan kedudukan, peran, serta sifat yang dilekatkan pada kaum wanita maupun pria melalui konstruksi secara sosial maupun kultural (Nurhaeni, 2009). Perubahan sifat dan ciri-ciri yang terjadi dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu lainnya disebut konsep *gender* (Fakih, 2004:71).

Menurut Hasples dan Suriyasarn (2005), *gender* (GENDER) merupakan sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan wanita dan pria yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kebutuhan, peran, serta peluang dan hambatan. Wanita cenderung dianggap lebih mematuhi peraturan dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, pria kemungkinan ketidakpatuhannya lebih besar jika dibandingkan dengan wanita (Alasfour, Samy, dan Bampton, 2016). *Gender* (GENDER) di dalam penelitian ini diukur dengan wanita dan pria karena perbedaan sifat dan ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun kode untuk wanita yaitu “1” dan untuk pria yaitu “2”.

3.3.2.2. *Education Level*

Education level atau tingkat pendidikan (EDLEV) merupakan tahap pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajar, dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Ihsan, 2003). Pendidikan tinggi pada Biro Pusat Statistik digolongkan menjadi D1, D2, D3, D4, S1, S2, dan S3. Penelitian ini mengukur *education level* (EDLEV) dengan mahasiswa D3 (Vokasi) Perpajakan Universitas Brawijaya dan mahasiswa S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya. Hal ini karena mahasiswa D3 Perpajakan Universitas Brawijaya lebih mempelajari praktik perpajakannya, sedangkan mahasiswa S1 Perpajakan Universitas Brawijaya lebih mempelajari teori perpajakannya. Adapun kode untuk mahasiswa D3 Perpajakan Universitas Brawijaya yaitu “1” dan untuk mahasiswa S1 Perpajakan Universitas Brawijaya yaitu “2”.

3.3.2.3. Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika *Tax Evasion*

Menurut McGee (2006), persepsi mengenai etika *tax evasion* merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis, etis, ataupun terkadang etis yang dilihat dari situasi atau kondisi sekitar yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi yang merupakan dimensi karakteristik *tax evasion*. Persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* (PERCEPTION) mempengaruhi sikap mahasiswa atas tindakan yang akan dilakukan mahasiswa ketika nantinya akan menjadi pembayar pajak atau wajib pajak. Contohnya yaitu ketika wajib pajak memandang bahwa sistem perpajakan tidak adil maka *tax evasion* dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima karena kondisi tertentu tersebut (Bo, Lambert, dan Thoresen, 2012). Jadi, persepsi mengenai etika *tax evasion* merupakan pandangan individu terhadap *tax evasion*

yang didukung dengan situasi sekitar sehingga individu dapat memberikan pandangan bahwa *tax evasion* merupakan suatu tindakan yang tidak etis, etis, atau terkadang etis. Penelitian ini mengukur persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* (PERCEPTION) berdasarkan dimensi karakteristiknya yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan skala likert 5 poin.

Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Item	Cara Pengukuran	Jenis Skala	Sumber
Gender (GENDER)	-	-	1. Pria 2. Wanita	Nominal	McGee, Nickerson, Pleshko, dan Broihahn (2012)
Education Level (EDLEV)	-	-	1. D3 2. S1	Ordinal	McGee, Nickerson, Pleshko, dan Broihahn (2012)
Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika <i>Tax Evasion</i> (PERCEPTION)	Keadilan Pajak	1. Pengeluaran negara 2. Proyek pemerintah 3. Keuntungan dari proyek	Skala Likert 5 poin	Interval	McGee (2006)
	Sistem Perpajakan	1. Tarif Pajak	Skala Likert 5 poin	Interval	McGee (2006)
	Diskriminasi	1. Tempat Tinggal 2. Suku 3. Kepentingan kelompok	Skala Likert 5 poin	Interval	McGee (2006)

Sumber: Data diolah, 2019.

3.4. Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert.

Skala likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang

atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Penelitian ini memiliki fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian. Variabel tersebut yang nantinya akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel.

Selanjutnya, indikator itu dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2018:152). Menurut Sugiyono (2018:153), jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai tingkatan dari sangat negatif sampai sangat positif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Likert

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Ragu-Ragu (R)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Sumber: Data diolah, 2019.

Penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin karena memiliki kategori tengah yang berfungsi untuk menghindari kesalahan sistematis dalam pengukuran (*error* pengukuran). Hal itu dapat terjadi jika tidak memiliki kategori tengah, karena responden dipaksa untuk memilih setuju atau tidak setuju yang kemungkinan membuat responden menjawab tidak sesuai dengan dirinya (Whidiarso, 2010:1). Selain itu, skala yang terlalu banyak membuat responden bingung untuk memilih karena tidak mengetahui secara pasti perbedaan tiap poin skala, sehingga nantinya menjadi bias (Hair *et al.*, 2006:237).

3.5. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber data, jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti (Narimawati, 2007:34). Adapun data primer dalam penelitian ini, sumber datanya yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang akan diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008:66).

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2016:225). Data sekunder berfungsi untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan beberapa data sekunder dengan sumber data berupa buku, jurnal, serta artikel. Buku dan jurnal tersebut digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya yang dijadikan sebagai tinjauan teoritis dan tinjauan empiris. Sementara itu, artikel yang digunakan oleh peneliti berfungsi untuk mendukung penelitian peneliti dengan fenomena yang berada di artikel tersebut. Hal ini digunakan untuk mengkaji secara kritis penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Sekaran, 2006:65).

Berdasarkan jangka waktu penelitiannya, penelitian ini menggunakan *cross sectional*. Adapun yang dimaksud dengan *cross sectional* yaitu data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak obyek penelitian (Ichwanudin,

Akhmadi, dan Setya, 2014:23). Penelitian ini meneliti persepsi mengenai etika *tax evasion* yang melibatkan banyak mahasiswa dalam satu periode akademik. Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya Malang. Sementara itu, periode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu satu periode akademik tahun 2019/2020.

3.6. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.6.1. Populasi

Populasi adalah generalisasi dari subyek atau obyek tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Menurut Priadana dan Muis (2009) bahwa populasi merupakan sekelompok orang, suatu gejala atau kejadian yang mempunyai karakteristik tertentu. Oleh karena itu, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Selanjutnya, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya Malang tahun akademik 2019/2020. Jumlah populasi penelitian ini yaitu sebanyak 1095 mahasiswa. Informasi tersebut didapatkan oleh peneliti dengan melakukan

prariset ke bidang akademik Fakultas Ilmu Administrasi dan Vokasi Universitas Brawijaya Malang.

Tabel 4. Populasi

No.	Education Level	Gender		Jumlah Mahasiswa
		Pria	Wanita	
1.	D3	127	307	434
2.	S1	272	389	661
Total Mahasiswa		399	696	1095

Sumber: Data diolah, 2019.

Alasan peneliti memilih mahasiswa aktif D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya tahun akademik 2019/2020 sebagai populasi karena penelitian ini mempertimbangkan pemahaman perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bias *experience*. Selanjutnya, di kota Malang yang memiliki program studi Perpajakan hanya di Universitas Brawijaya dengan program D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana).

3.6.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika jumlah populasi terlalu besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut karena keterbatasan tenaga, dana, waktu, dan sebagainya. Keterbatasan tersebut dapat diatasi oleh peneliti dengan menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus mewakili populasi atau benar-benar representatif (Sugiyono, 2018:131).

Menurut Sanusi (2011:101), jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. Penentuan sampel dengan rumus ini masih memasukkan unsur kelonggaran yang dapat ditoleransi dengan nilai toleransi ini dinyatakan dalam

presentase. Penelitian ini menggunakan nilai toleransi sebesar 5%. Jumlah sampel pada penelitian ini akan dihitung dengan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Presentase tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (error).

Diketahui jumlah populasi (N) pada penelitian ini yaitu sejumlah 1095 mahasiswa, dengan persentase tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi (e) sebesar 5% atau 0,05. Adapun perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{1095}{1 + (1095 \times 0,05^2)} \\ n &= \frac{1095}{1 + (1095 \times 0,0025)} = \frac{1095}{1 + 2,7375} \\ n &= \frac{1095}{3,7375} = 292,98 \end{aligned}$$

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *probability sampling* dengan jenis *proportionate stratified random sampling*. *Proportionate stratified random sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding, sesuai dengan proporsional ukurannya (Siregar, 2017:31). Adapun rumus untuk

menentukan sampel dengan *proportionate stratified random sampling* yaitu sebagai berikut:

$$\frac{n}{k} \times \text{jumlah sampel}$$

Keterangan:

n = jumlah populasi setiap kelompok

k = jumlah seluruh populasi

Tabel 5. *Proportionate Stratified Random Sampling*

No.	Karakteristik Demografis	Perhitungan	Jumlah Mahasiswa (Sampel)
1.	<i>Gender:</i> a. Pria	$\frac{399}{1095} \times 292,98 = 106,757$	107
	b. Wanita	$\frac{696}{1095} \times 292,98 = 186,223$	186
Total Mahasiswa			293
2.	<i>Education Level:</i> a. D3	$\frac{434}{1095} \times 292,98 = 116,122$	116
	b. S1	$\frac{661}{1095} \times 292,98 = 176,858$	177
Total Mahasiswa			293

Sumber: Data diolah, 2019.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang tersedia. Pengumpulan data bertujuan untuk

menyusun data-data yang telah dikumpulkan sehingga diketahui hubungan antara data-data tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah informasi (Sugiyono:2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Teknik pengumpulan data kuesioner ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dengan seperangkat pernyataan yang telah dibuat oleh peneliti berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan. Selanjutnya, responden menjawab pernyataan-pernyataan tersebut sehingga peneliti dapat mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi (Sugiyono, 2018:219).

Peneliti melakukan *pilot test* sebelum menyebarkan kuesioner agar isi kuesioner tersebut dapat dipahami. *Pilot test* digunakan untuk menguji kuesioner, apakah isi kuesioner tersebut dipahami oleh kebanyakan orang atau tidak. Hal ini karena kuesioner yang digunakan pada penelitian ini merupakan terjemahan dari penelitian terdahulu yang merupakan jurnal internasional. Selanjutnya, setelah melakukan *pilot test* peneliti melakukan uji validitas. Syarat uji validitas yaitu ≥ 30 responden, sehingga peneliti melakukan *pilot test* dengan jumlah responden sebanyak 30 responden (Darmawan, 2013:180). Ketika terdapat item kuesioner yang tidak valid, peneliti akan mengubah pola kalimat sesuai saran pada saat melakukan *pilot test* agar dimengerti oleh sejumlah mahasiswa yang termasuk ke dalam sampel penelitian. Namun, hasil uji validitas yang dapat kita lihat pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa semua item kuesioner dinyatakan valid karena nilai signifikan $< 0,05$ dan $R_{hitung} > R_{tabel}$. Langkah berikutnya yaitu melakukan uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* sebesar

0,898 yang berarti $> 0,70$ sehingga kuesioner tersebut reliabel. Jadi, kuesioner penelitian dapat disebarkan ke sampel pada penelitian ini.

Kuesioner ini terdiri dari 18 item pernyataan yang disusun berdasarkan penelitian McGee (2006). Penelitian McGee (2006) meneliti tentang etika *tax evasion* dengan tujuan untuk mengetahui apakah *tax evasion* etis, tidak etis, atau terkadang etis untuk dilakukan. Ketiga pandangan tersebut dapat dilihat berdasarkan tiga dimensi karakteristik *tax evasion* yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Penelitian McGee (2006) mengadopsi lima belas item pernyataan dari penelitian Crowe pada tahun 1994 dengan menambahkan tiga item pernyataan. Adapun ketiga item pernyataan tersebut yaitu mengenai hak asasi manusia (HAM) yang menjadi item dari diskriminasi. Selanjutnya, penelitian McGee, Aljaaidi, dan Musaibah (2012) mengganti satu item pernyataan mengenai kaum yahudi menjadi kaum muslimin.

Kuesioner ini memiliki dua bagian, dimana bagian pertama kuesioner menanyakan tentang karakteristik demografis responden yang terdiri dari nama, nomor *handphone*, tanggal lahir, kota asal, jenis kelamin, angkatan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Sementara itu, bagian kedua kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan kuisisioner mengenai keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi yang digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion*. Pengukuran persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* menggunakan skala likert 5 poin.

3.8. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data, diantaranya yaitu sebagai berikut:

3.8.1. Uji Instrumen Penelitian

Data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dengan menggunakan SPSS versi 23. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu yaitu menguji keabsahan dan kereliabelan suatu kuesioner sebelum kuesioner akan disebarkan kepada responden. Pengujian keabsahan dan kereliabelan suatu kuesioner diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

3.8.1.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur valid (sah) atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, uji validitas ini ingin mengukur apakah pertanyaan yang ada pada kuisoner yang kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang ingin kita ukur (Ghozali, 2013:52).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengukur berupa korelasi *Pearson Product Moment*. Apabila sampel normal (≥ 30), maka untuk menguji validitas kuesioner menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* (Darmawan, 2013:180). Uji validitas penelitian ini mengacu pada syarat yang ditetapkan menurut Sugiyono (2011:179), yaitu sebagai berikut:

1. Jika $R_{hitung} \geq$ dari 0.3494, maka item pertanyaan dinyatakan valid.

2. Jika $R_{hitung} \leq$ dari 0.3494, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

3.8.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Persepsi mengenai etika *tax evasion* yang diukur dengan tiga indikator yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Masing-masing indikator tersebut mengukur persepsi mengenai etika *tax evasion* seorang mahasiswa. Jika jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan konsisten, maka dapat dikatakan reliabel. Sementara itu, jika dijawab tidak konsisten, maka dapat dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2013:47).

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran ini dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Aplikasi SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika suatu variabel atau konstruk memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 , maka dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2013:48).

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Langkah kedua yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan analisis data yaitu dengan menguji kelayakan data dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak layak. Uji asumsi klasik terdiri dari

uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, uji linearitas, serta uji normalitas (Ghozali, 2013:101). Penelitian ini hanya menggunakan satu uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, karena persyaratan dari uji *independent samples t-test* yaitu sebaran data berdistribusi normal dan varians antar kelompok sama atau homogen. Penelitian ini tidak menggunakan uji heterokedastisitas untuk uji homogenitas karena variabel pada penelitian ini merupakan non metriks sehingga menggunakan *levene's test*.

3.8.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Selain itu, uji ini juga bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013:154). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap normalitas data. Perbandingan nilai signifikannya adalah jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (Ghozali, 2013:158).

3.8.3. Analisis Statistik Deskriptif

Langkah ketiga yang dilakukan setelah menguji kelayakan data yaitu melakukan analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data pada suatu penelitian dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa

bermaksud menghasilkan kesimpulan secara umum atau tergeneralisasi (Sugiyono, 2018: 226). Analisis deskriptif berguna untuk menyederhanakan data yang terkumpul. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, sum, standar deviasi, range, variasi, skewness, dan kurtosis (Ghozali, 2013:19). Hasil analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisa nilai maksimum, minimum, standar deviasi, rata-rata, skewness, dan kurtosis sehingga dapat menggambarkan karakteristik atau fenomena data tersebut (Jugiyanto, 2010:163).

3.8.4. Uji Beda (Independent Sample t - Test)

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis hipotesis penelitian. Analisis yang digunakan untuk uji hipotesis penelitian yaitu uji beda. Uji beda terdiri dari ANOVA, MANOVA, *Paired Samples t-Test*, serta *Independent Samples t-Test*. Penelitian ini menggunakan uji *Independent Samples t-Test* karena membandingkan *mean* dari 2 kelompok data yang berskala interval dan kedua kelompok tersebut tidak saling berpasangan.

Adapun pengertian *Independent Samples t-Test* merupakan uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata antara dua kelompok yang tidak berpasangan, yang berskala data interval atau rasio. Kelompok yang tidak berpasangan yang dimaksud memiliki arti bahwa sumber data berasal dari dua subyek yang berbeda (Ghozali, 2018:64). Pemrosesan data menggunakan SPSS (*Statistical Package for The Social Science*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pada obyek yang diteliti dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu variabel demografis dan persepsi mahasiswa atas etika *tax evasion*.
- b. Gunakan fungsi *Analyze, Compare Means*, kemudian *Independent Samples t-Test* untuk mengelola kedua kelompok tersebut. Menurut Jugiyanto (2010), *Independent Samples t-Test* juga dapat ditulis dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Keterangan:

t = Nilai hitung t

X_1 = Rata-rata sampel 1

X_2 = Rata-rata sampel 2

S_1^2 = Simpangan baku sampel 1

S_2^2 = Simpangan baku sampel 2

n_1 = Varians sampel 1

n_2 = Varians sampel 2

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 6. Universitas Brawijaya
Sumber: Data diolah, 2019.

Sejarah Universitas Brawijaya berawal dari nama Universitas Brawijaya yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Nomor 258/K/61 dikirim pada 11 Juli 1961. Nama ini berasal dari gelar Raja Majapahit, sebuah kerajaan besar di Indonesia dari abad ke 12 hingga 15. Universitas Brawijaya berubah menjadi universitas negeri pada tanggal 5 Januari 1963, mengikuti Keputusan Presiden yang dikeluarkan sebelumnya di tahun yang sama. Tanggal ini kemudian diumumkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Brawijaya yang biasanya disebut dengan Dies Natalies di antara anggota masyarakat akademik Indonesia.

Universitas Brawijaya sebelumnya dikenal publik dengan nama UNBRA dan selanjutnya dikenal dengan nama UNIBRAW. Rapat Senat Universitas Brawijaya pada 17 Maret 2008 meresmikan nama UB sebagai akronim resmi Universitas Brawijaya. Selanjutnya, lagu hymne Universitas Brawijaya (UB) disusun oleh seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang bernama Yanardhana pada tahun 1963, sedangkan Mars UB disusun oleh Lilik Sugiarto pada tahun 1996. Kedua lagu tersebut masih sering dinyanyikan hingga hari ini.

Kampus UB terletak di kota Malang, Jawa Timur, di lokasi yang strategis sehingga dapat dengan mudah dicapai dengan transportasi umum. Malang sebagai kota pendidikan telah berkembang pesat. Hal ini sepertinya tidak terlepas dari kejayaan Jawa Timur di masa lalu. UB adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa dalam berbagai gelar mulai dari Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Spesialis Medis, di 12 Fakultas, 2 tingkat Fakultas Program, 1 Program Kejuruan, dan 1 Program Pascasarjana.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Vokasi Universitas Brawijaya yang terletak di Jalan Veteran No. 12-13 Malang. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 163 Malang. Program Studi Perpajakan di Malang hanya terdapat di Universitas Brawijaya yang terdiri dari Program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1).

4.2. Gambaran Umum Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Perpajakan tahun akademik 2019/2020 Program Studi Perpajakan Vokasi dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Gambaran umum responden menjelaskan karakteristik responden berdasarkan tanggal lahir, kota asal, urutan anak, agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, angkatan, status, pengalaman kerja, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut ini akan disajikan dan dijelaskan tentang gambaran umum dari masing-masing responden.

4.2.1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
D3	116	39,59%
S1	177	60,41%
Total	293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 6 diatas, diketahui bahwa responden yang menempuh tingkat pendidikan D3 berjumlah 116 orang atau sebesar 39,59% dari total keseluruhan responden. Sementara itu, responden yang menempuh tingkat pendidikan S1 berjumlah 177 orang atau sebesar 60,41% dari total keseluruhan responden. Hal ini dikarenakan daya tampung (kuota) penerimaan mahasiswa pada S1 (Sarjana) Perpajakan lebih besar jika dibandingkan dengan D3 (Vokasi) Perpajakan Universitas Brawijaya (Info Kampus News, 2019). Selain itu, jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan ditentukan berdasarkan rumus *proportionate random sampling*. Jadi, jumlah mahasiswa pada tingkat pendidikan

S1 (Sarjana) lebih banyak jika dibandingkan dengan mahasiswa dengan tingkat pendidikan D3 (Vokasi).

4.2.2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	D3	S1	Jumlah Responden	Presentase (%)
Perempuan	68	118	186	63,48%
Laki-Laki	48	59	107	36,52%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 7 diatas, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 107 orang atau sebesar 36,52% dari total keseluruhan responden. Tingkat pendidikan D3 (Vokasi) lebih rendah daripada mahasiswa laki-lakinya pada tingkat pendidikan S1 (Sarjana), walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Sementara itu, responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 186 orang atau sebesar 63,48% dari total keseluruhan responden. Jika dilihat, jumlah mahasiswa perempuan pada tingkat pendidikan D3 (Vokasi) lebih sedikit jumlah mahasiswa perempuannya jika dibandingkan dengan mahasiswa perempuan di tingkat pendidikan S1 (Sarjana). Jadi, responden didominasi oleh perempuan.

Hal ini dikarenakan prospek kerja perempuan pada progam studi ini lebih baik jika dibandingkan dengan pria. Perusahaan dalam pekerjaan di bidang ini lebih mencari pegawai perempuan karena lebih teliti, berkonsentrasi tinggi, dan rapi (Yuwono, 2016). Selain itu, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin juga ditentukan dengan menggunakan rumus *proportionate random sampling*. Jadi,

jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan jika dibandingkan dengan dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga menunjukkan bahwa minat perempuan di bidang perpajakan lebih tinggi.

4.2.3. Berdasarkan Angkatan

Data karakteristik responden berdasarkan tahun masuk kuliah dapat dibagi menjadi beberapa angkatan. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan jumlah setiap angkatan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Responden Berdasarkan Angkatan

Angkatan	D3	S1	Jumlah	Presentase (%)
2013	0	1	1	0,34%
2014	0	1	1	0,34%
2015	0	56	56	19,11%
2016	0	15	15	5,12%
2017	18	38	56	19,11%
2018	73	28	101	34,47%
2019	25	38	63	21,50%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 8 diatas, diketahui 1 responden berasal dari angkatan 2013 yang merupakan mahasiswa S1 (Sarjana) Perpajakan dengan presentase 0,34%, serta 1 responden berasal dari angkatan 2014 dengan presentase 0,34% yang merupakan mahasiswa S1 (Sarjana) Perpajakan berdasarkan jumlah keseluruhan responden. Selanjutnya, 56 responden berasal dari angkatan 2015 dengan presentase 19,11%, 15 responden berasal dari angkatan 2016 dengan presentase 5,12% yang merupakan mahasiswa S1 (Sarjana) Perpajakan berdasarkan jumlah keseluruhan responden. Tingkat pendidikan D3 (Vokasi) pada angkatan 2012 sampai dengan angkatan 2016 berjumlah 0 karena sudah lulus. Hal ini dikarenakan

mahasiswa Perpajakan D3 (Vokasi) telah memprogram mata kuliahnya sehingga dapat lulus tepat waktu.

Selanjutnya, 56 responden berasal dari angkatan 2017 dengan presentase 19,11%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 18 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 38 responden. Responden yang berasal dari angkatan 2018 berjumlah 101 responden dengan presentase 34,47%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 73 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 28 responden. Responden yang berasal dari angkatan 2019 berjumlah 63 responden dengan presentase 21,50% dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 25 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 38 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa angkatan 2018 memiliki jumlah mahasiswa yang paling banyak terutama tingkat pendidikan D3 (Vokasi) yang belum menempuh mata kuliah *tax planning*. Sementara itu, jumlah mahasiswa pada angkatan 2013 dan 2014 lebih sedikit karena angkatan tersebut merupakan mahasiswa semester akhir yang seharusnya sudah menyelesaikan perkuliahannya.

4.2.4. Berdasarkan Usia

Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Usia Responden

Usia	D3	S1	Jumlah Responden	Presentase (%)
17	2	3	5	1,71%
18	21	27	48	16,38%
19	50	36	86	29,35%
20	34	33	67	22,87%
21	9	23	32	10,92%
22	0	43	43	14,68%

Usia	D3	S1	Jumlah Responden	Presentase (%)
23	0	11	11	3,75%
24	0	1	1	0,34%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 9 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang berusia 17 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 1,71%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 2 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 3 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berusia 18 tahun berjumlah 48 orang atau sebesar 16,38%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 21 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 27 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berusia 19 tahun berjumlah 86 orang atau sebesar 29,35%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 50 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 36 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berusia 20 tahun berjumlah 67 orang atau sebesar 22,87%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 34 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 33 responden berdasarkan total keseluruhan responden.

Selanjutnya, responden yang berusia 21 tahun berjumlah 32 orang atau sebesar 10,92%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 9 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 23 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berusia 22 tahun berjumlah 43 orang atau sebesar 14,68% dari mahasiswa S1 (Sarjana) berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berusia 23 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 3,75% dari mahasiswa S1 (Sarjana) berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berusia 24 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 0,34% dari mahasiswa S1 (Sarjana)

berdasarkan jumlah keseluruhan responden. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mahasiswa dengan usia 19 lebih banyak karena angkatan yang mendominasi yaitu angkatan 2018 berdasarkan Tabel 8.

4.2.5. Berdasarkan Pengalaman Kerja

Data karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja	D3	S1	Jumlah	Presentase (%)
Punya	19	38	57	19,45%
Tidak Punya	97	139	236	80,55%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 10 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai pengalaman kerja berjumlah 57 orang atau sebesar 19,45%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 19 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 38 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Sementara itu, responden yang tidak memiliki pengalaman kerja berjumlah 236 orang atau sebesar 80,55% , dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 97 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 139 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa D3 (Vokasi) maupun S1 (Sarjana), kebanyakan belum mempunyai pengalaman kerja karena didominasi dengan mahasiswa yang belum melakukan magang.

4.2.6. Berdasarkan Kepunyaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Data karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 11. Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

NPWP	D3	S1	Jumlah	Presentase (%)
Punya	1	4	5	1,71%
Tidak Punya	115	173	288	98,29%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 11 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang belum memiliki NPWP berjumlah 288 orang atau sebesar 98,29%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 115 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 173 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Sementara itu, responden yang sudah memiliki NPWP berjumlah 5 orang atau sebesar 1,71%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 1 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 4 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa baik D3 (Vokasi) maupun S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya lebih banyak yang tidak memiliki NPWP jika dibandingkan dengan yang mempunyai NPWP. Hal ini karena mahasiswa lebih dominan yang belum mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan Tabel 10.

4.2.7. Berdasarkan Provinsi

Data karakteristik responden berdasarkan provinsi yang merupakan kota asal responden, sehingga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Responden Berdasarkan Provinsi

Provinsi	D3	S1	Jumlah Responden	Presentase (%)
Jawa Barat	5	11	16	5,46%
Jawa Tengah	4	6	10	3,41%
Jawa Timur	102	93	195	66,55%
DKI Jakarta	2	23	25	8,53%
Banten	0	2	2	0,68%

Provinsi	D3	S1	Jumlah Responden	Presentase (%)
Sumatera Selatan	0	6	6	2,05%
Sumatera Barat	1	1	2	0,68%
Sumatera Utara	0	4	4	1,37%
Kalimantan Utara	0	4	4	1,37%
Kalimantan Timur	0	5	5	1,71%
Kalimantan Tengah	0	1	1	0,34%
Kalimantan Selatan	0	1	1	0,34%
Kalimantan Barat	0	1	1	0,34%
NTT	0	5	5	1,71%
NTB	0	1	1	0,34%
Bali	1	2	3	1,02%
Riau	1	0	1	0,34%
Kepulauan Riau	0	1	1	0,34%
Sulawesi Tengah	0	2	2	0,68%
Sulawesi Selatan	1	1	2	0,68%
Gorontalo	1	0	1	0,34%
Lampung	0	2	2	0,68%
Papua Barat	0	3	3	1,02%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari provinsi Jawa Barat berjumlah 16 orang atau sebesar 5,46%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 5 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 11 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Selanjutnya, responden yang berasal dari provinsi Jawa Tengah berjumlah 10 orang atau sebesar 3,41%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 4 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 6 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Jawa Timur berjumlah 195 atau sebesar 66,55%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 102 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 93 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari

provinsi DKI Jakarta berjumlah 25 atau sebesar 8,53%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 2 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 23 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Banten berjumlah 2 atau sebesar 0,68%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 2 responden berdasarkan total keseluruhan responden.

Selain itu, responden yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6 atau sebesar 2,05%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 6 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Sumatera Barat berjumlah 2 atau sebesar 0,68%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 1 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 1 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Sumatera Utara berjumlah 4 atau sebesar 1,37%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 4 responden berdasarkan total keseluruhan responden.

Responden yang berasal dari provinsi Kalimantan Utara berjumlah 4 atau sebesar 1,37%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 4 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Kalimantan Timur berjumlah 5 atau sebesar 1,71%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 5 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Kalimantan Tengah

berjumlah 1 atau sebesar 0,34%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 1 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 1 atau sebesar 0,34%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 1 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Kalimantan Barat berjumlah 1 atau sebesar 0,34%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 1 responden berdasarkan total keseluruhan responden.

Selanjutnya, responden yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 5 atau sebesar 1,71%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 5 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 1 atau sebesar 0,34%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 1 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Bali berjumlah 3 atau sebesar 1,02%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 1 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 2 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Riau berjumlah 1 atau sebesar 0,34%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 1 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 0 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1 atau sebesar 0,34%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi)

yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 1 responden berdasarkan total keseluruhan responden.

Sementara itu, responden yang berasal dari provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 2 atau sebesar 0,68%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 2 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 2 atau sebesar 0,68%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 1 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 1 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Gorontalo berjumlah 1 atau sebesar 0,34%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 1 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 0 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Responden yang berasal dari provinsi Lampung berjumlah 2 atau sebesar 0,68%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 2 responden berdasarkan total keseluruhan responden.

Responden yang berasal dari provinsi Papua Barat berjumlah 3 atau sebesar 1,02%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 0 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 3 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 15 di atas, mahasiswa Perpajakan baik D3 (Vokasi) maupun S1 (Sarjana) Universitas Brawijaya didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari provinsi Jawa Timur. Hal ini karena Universitas Brawijaya terletak di Malang, Jawa Timur, sehingga mahasiswa disekitar Jawa Timur lebih banyak berkuliah di Perpajakan Universitas Brawijaya.

Selain itu juga, asal provinsi mahasiswa S1 (Sarjana) lebih beragam jika dibandingkan dengan mahasiswa D3 (Vokasi). Hal ini karena jumlah mahasiswa S1 (Sarjana) lebih banyak jika dibandingkan dengan D3 (Vokasi) yang sesuai dengan Tabel 9.

4.2.8. Berdasarkan Urutan Anak

Data karakteristik responden berdasarkan urutan anak dalam suatu keluarga responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Urutan Anak dalam Suatu Keluarga Responden

Urutan Anak	D3	S1	Jumlah Responden	Presentase (%)
Tunggal	14	14	28	9,56%
Sulung	45	67	112	38,23%
Tengah	19	42	61	20,82%
Bungsu	38	54	92	31,40%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 13 diatas, diketahui bahwa 28 responden yang merupakan anak tunggal dikeluarganya dengan presentase 9,56%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang sama-sama berjumlah 14 responden. Responden yang merupakan anak sulung dikeluarganya berjumlah 112 dengan presentase 38,23%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 45 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 67 responden berdasarkan jumlah keseluruhan responden. Sementara itu, 61 responden yang merupakan anak tengah dikeluarganya dengan presentase 20,82%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang berjumlah 19 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 42 responden.

Selanjutnya yang terakhir yaitu 92 responden yang merupakan anak bungsu dikeluarganya dengan presentase 31,40%, dengan mahasiswa D3 (Vokasi) yang

berjumlah 38 responden dan mahasiswa S1 (Sarjana) yang berjumlah 54 responden berdasarkan jumlah keseluruhan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa Perpajakan baik D3 (Vokasi) maupun S1 (Sarjana) didominasi dengan anak pertama atau anak sulung. Selain itu, jumlah yang paling sedikit yaitu anak tunggal pada mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya.

4.2.9. Berdasarkan Agama

Data karakteristik responden berdasarkan urutan anak dalam suatu keluarga responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Responden Berdasarkan Agama

Agama	D3	S1	Jumlah Responden	Presentase (%)
Islam	105	159	264	90,10%
Kristen	4	3	7	2,39%
Kristen Protestan	3	5	8	2,73%
Katolik	2	9	11	3,75%
Hindu	2	1	3	1,02%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 14 diatas, diketahui bahwa 264 responden menganut agama Islam dengan presentase 90,10%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 105 responden dan 159 (Sarjana) berjumlah 28 responden. Responden yang menganut agama Kristen berjumlah 7 responden dengan presentase 2,39%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 4 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 3 responden. Sementara itu, 8 responden yang menganut agama Kristen Protestan dengan presentase 2,73%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 3 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 5 responden. Responden yang menganut agama Katolik berjumlah 11 dengan presentase 3,75%, dengan rincian

mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 2 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 9 responden.

Selanjutnya, 3 responden yang menganut agama Hindu dengan presentase 1,02%, , dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 2 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 1 responden dari jumlah keseluruhan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa baik D3 (Vokasi) maupun S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya didominasi dengan penganut agama Islam. Hal ini karena di Indonesia sendiri didominasi dengan muslim (Indonesia.go.id, 2019).

4.2.10. Berdasarkan Status Pernikahan

Data karakteristik responden berdasarkan status pernikahan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status Pernikahan	D3	S1	Jumlah	Presentase (%)
Lajang	116	175	291	99,32%
Menikah	0	2	2	0,68%
Total			293	100,00%

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 15 diatas, dapat diketahui bahwa responden yang belum menikah (lajang) berjumlah 291 orang atau sebesar 99,32%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 116 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 175 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Sementara itu, responden yang sudah menikah berjumlah 2 orang atau sebesar 0,68%, dengan rincian mahasiswa D3 (Vokasi) berjumlah 0 responden dan S1 (Sarjana) berjumlah 2 responden berdasarkan total keseluruhan responden. Hasil penelitian ini didominasi dengan

mahasiswa lajang jika dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah menikah. Hal ini karena berdasarkan usia mahasiswa pada Tabel 9 lebih banyak mahasiswa dengan usia belia.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

Adapun analisis hasil penelitian dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

4.3.1. Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui keabsahan dan kereliabelan kuesiner, yaitu sebagai berikut ini:

4.3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Uji tersebut ingin mengukur apakah pertanyaan atau pernyataan dalam suatu kuesioner yang telah dibuat dapat benar-benar mengukur sesuatu yang akan diukur. Adapun cara yang dilakukan pada uji ini yaitu dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan atau pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel (Ghozali, 2011:52).

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik *pearson correlation*, dimana instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi (r) hitung $> 0,349$ atau signifikansinya $< 0,05$. Sementara itu, jika koefisien korelasi (r) hitung $< 0,349$ atau signifikansinya $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa

instrumen penelitian tidak valid. Berdasarkan perhitungan *software* SPSS sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Validitas

No. Item	r_{hitung}	$R_{tabel\ 5\% (30)}$	Sig.	Kriteria
1	0,706	0,349	0,000	Valid
2	0,594	0,349	0,001	Valid
3	0,511	0,349	0,004	Valid
4	0,496	0,349	0,005	Valid
5	0,722	0,349	0,000	Valid
6	0,756	0,349	0,000	Valid
7	0,587	0,349	0,001	Valid
8	0,680	0,349	0,000	Valid
9	0,573	0,349	0,001	Valid
10	0,402	0,349	0,028	Valid
11	0,691	0,349	0,000	Valid
12	0,796	0,349	0,000	Valid
13	0,722	0,349	0,000	Valid
14	0,615	0,349	0,000	Valid
15	0,486	0,349	0,006	Valid
16	0,413	0,349	0,023	Valid
17	0,641	0,349	0,000	Valid
18	0,474	0,349	0,008	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Berdasarkan Tabel 16 di atas, angka r_{hitung} untuk item pernyataan pertama yaitu nomor 1 sebesar 0.706. Sementara itu, untuk item pernyataan nomor 2 memiliki r_{hitung} sebesar 0.594, nomor 3 sebesar 0.511, nomor 4 sebesar 0.496, nomor 5 sebesar 0.722, nomor 6 sebesar 0.756, nomor 7 sebesar 0.587, nomor 8 sebesar 0.680, nomor 9 sebesar 0.573, nomor 10 sebesar 0.402, nomor 11 sebesar 0.691, nomor 12 sebesar 0.796, nomor 13 sebesar 0.722, nomor 14 sebesar 0.615, nomor 15 sebesar 0.486, nomor 16 sebesar 0.413, nomor 17 sebesar 0.641. Selanjutnya, untuk item pernyataan yang terakhir yaitu nomor 18 memiliki r_{hitung} sebesar 0.474. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang terkait dengan variabel

penelitian ini adalah valid karena $r_{hitung} > 0.341$. Jadi, item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel (Ghozali, 2013:47). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,70$ (Ghozali, 2013:48). Berdasarkan perhitungan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,898	18

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 17, diketahui angka *Cronbach's Alpha* yaitu sebesar 0,898. Angka tersebut lebih besar dari nilai minimal *Cronbach's Alpha* yaitu sebesar 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan data pada penelitian. Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas agar mengetahui uji beda apakah yang akan digunakan. Jika berdistribusi normal peneliti akan menggunakan uji *Independent Sampels t-Test* untuk menganalisis data. Jika tidak berdistribusi normal maka peneliti akan menggunakan uji *Mann-Whitney*. Selain itu, peneliti tidak menggunakan uji heterokedastisitas dalam menguji homogenitas karena variabel independen peneliti merupakan variabel non metriks.

4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013:154). Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test*. Adapun dasar pengambilan keputusan pada metode ini yaitu jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (Ghozali, 2013:158). Berdasarkan hasil pengujian data dengan *software* SPSS, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 18. *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

			PERCEPTION
N			293
Normal Parameters	a,b	Mean	44.06
		Std. Deviation	10.617
Kolmogorov-Smirnov Z			1.329
Asymp. Sig. (2-tailed)			.058

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 18, diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,058. Hal ini berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data persamaan regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.3.3. Metode Analisis Data

4.3.3.1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data pada suatu penelitian dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud menghasilkan kesimpulan secara umum atau tergeneralisasi (Sugiyono, 2018: 226). Hasil pengolahan data yang diperoleh yaitu berupa rata-rata (*mean*) dan *standart*

deviation. Berikut ini merupakan hasil dari statistik deskriptif pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Statistik Deskriptif

GENDER	EDUCATION LEVEL	Mean	Std. Deviation	N
M	D3	43.46	10.623	48
	S1	48.46	12.231	59
	Total	46.21	11.753	107
W	D3	37.03	7.417	68
	S1	46.15	9.342	118
	Total	42.82	9.723	186
Total	D3	39.69	9.396	116
	S1	46.92	10.417	177
	Total	44.06	10.617	293

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 19, dapat dilihat bahwa mahasiswa laki-laki di Vokasi Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata sebesar 43.46 dengan standar deviasi PERCEPTION sebesar 10.623, sedangkan mahasiswa laki-laki di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata sebesar 48.46 dengan standar deviasi PERCEPTION sebesar 12.231. Hal ini berarti bahwa mahasiswa laki-laki di Fakultas Ilmu Administrasi lebih besar rata-rata dan standar deviasinya jika dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki di Vokasi Universitas Brawijaya.

Selanjutnya, mahasiswa perempuan di Vokasi Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata sebesar 37.03 dengan standar deviasi PERCEPTION sebesar 7.417. Sementara itu, mahasiswa perempuan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata sebesar 46.15 dengan standar deviasi PERCEPTION sebesar 9.342. Hal ini berarti bahwa PERCEPTION rata-rata dan standar deviasi PERCEPTION mahasiswa perempuan

Fakultas Ilmu Administrasi lebih besar dari mahasiswa perempuan Vokasi Universitas Brawijaya.

Mahasiswa Perpajakan Vokasi Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata sebesar 39.69 dengan standar deviasi PERCEPTION sebesar 9.396. Sementara itu, mahasiswa Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata sebesar 46.92 dengan standar deviasi PERCEPTION sebesar 10.417. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata dan standar deviasi PERCEPTION yang lebih besar jika dibandingkan dengan mahasiswa Perpajakan Vokasi Universitas Brawijaya.

4.3.4. Uji Hipotesis

4.3.4.1. *Independent Samples t-Test*

Independent Samples t-Test merupakan uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata antara dua kelompok yang tidak berpasangan, yang berskala data interval atau rasio (Ghozali, 2018:64). Berikut ini merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software* SPSS yaitu sebagai berikut:

Tabel 20. *Group Statistics Gender*

	GENDER	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERCEPTION	M	107	46.21	11.753	1.136
	W	186	42.82	9.723	.713

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Berdasarkan Tabel 20, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa dengan GENDER laki-laki memiliki rata-rata sebesar 46.21 dan standar deviasi sebesar 11.753 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mahasiswa dengan GENDER

perempuan. Mahasiswa dengan GENDER perempuan memiliki rata-rata sebesar 42.82 dengan standar deviasi sebesar 9.723.

Tabel 21. *Independent Samples Test Gender*

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of The Difference	
						Lower	Upper
PERCEPTION	Equal variances assumed	.110	.740	.008	3.40	.888	5.907
	Equal variances not assumed			.012	3.40	.752	6.044

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 21, dapat kita perhatikan bahwa nilai F hitung uji *levene's test* sebesar 0.110 dengan nilai signifikan sebesar 0.740. Suatu populasi dikatakan homogen jika nilai signifikan uji *levene's test* > 0.05 (Ghozali, 2013:66). Jadi, karena hasil nilai signifikan uji *levene's test* > 0.05 yaitu sebesar 0.740 maka dapat dikatakan bahwa populasi pada GENDER adalah homogen. Jadi, karena homogen maka untuk analisis uji *independent samples t-test* menggunakan *equal variance assumed*.

Jika kita melihat signifikansi *two tail* pada uji *independent samples t-test gender* pada *equal variance assumed*, nilai signifikansinya sebesar 0.08. Hal itu berarti bahwa nilai signifikansi *two tail* lebih besar dari 0.05 sehingga mahasiswa perpajakan dengan GENDER laki-laki dan GENDER perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap PERCEPTION.

Tabel 22. *Group Statistics Education Level*

EDUCATION LEVEL		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERCEPTION	S1	177	46.92	10.417	.783
	D3	116	39.69	9.396	.872

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Berdasarkan Tabel 22, dapat disimpulkan bahwa PERCEPTION Vokasi (D3) Universitas Brawijaya memiliki rata-rata sebesar 39.69 dan standar deviasi PERCEPTION sebesar 9.396 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mahasiswa Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi (S1) Universitas Brawijaya. Mahasiswa Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi (S1) Universitas Brawijaya memiliki PERCEPTION rata-rata sebesar 46.92 dengan standar deviasi PERCEPTION sebesar 10.417.

Tabel 23. *Independent Samples Test Education Level*

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of The Difference	
						Lower	Upper
PERCEPTION	Equal variances assumed	1.908	.168	.000	7.23	4.874	9.588
	Equal variances not assumed			.000	7.23	4.923	9.539

Sumber: Data diolah dari SPSS, 2019.

Berdasarkan Tabel 23, nilai F hitung uji *levене's test* sebesar 1.908 dengan nilai signifikan sebesar 0.168. Suatu populasi dikatakan homogen jika nilai signifikan uji *levене's test* > 0.05 (Ghozali, 2013:66). Jadi, karena hasil nilai signifikan uji *levене's test* > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa populasi pada EDLEV adalah homogen. Jadi, karena homogen maka untuk analisis uji *independent samples t-test* menggunakan *equal variance assumed*.

Selanjutnya, jika kita melihat signifikansi *two tail* pada uji *independent samples t-test* EDLEV pada *equal variance assumed*, nilai signifikansinya sebesar 0.00. Hal itu berarti bahwa nilai signifikansi *two tail* lebih kecil dari 0.05 sehingga mahasiswa Perpajakan Vokasi (D3) Universitas Brawijaya dan mahasiswa

Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi (S1) Universitas Brawijaya memiliki perbedaan yang signifikan terhadap PERCEPTION.

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil analisis data penelitian tentang persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender* dan *education level*. Berikut ini merupakan pembahasan atau uraian mengenai hasil penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* oleh mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya berdasarkan *gender*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan *gender*. Hal ini berarti bahwa hipotesis (H_1) ditolak. Meskipun hipotesis ditolak, hasil penelitian ini mendukung teori Teleologi. Jika kita kaitkan dengan Teori Teleologi, persepsi rata-rata mahasiswa tersebut sama. Mereka menganggap bahwa ketika pemerintah melakukan korupsi, penerimaan pajak yang dibuang sia-sia, sistem perpajakan yang tidak adil, maka *tax evasion* dipandang etis untuk dilakukan. Sebaliknya, ketika sistem perpajakan adil, penerimaan pajak digunakan dengan bijak, dan sebagainya maka *tax evasion* merupakan hal yang tidak etis. Hal ini sejalan dengan Teori Teleologi karena ketika membayar pajak, masyarakat tidak merasakan manfaat secara langsung seperti yang seharusnya dirasakan, serta terdapat beberapa kondisi yang merugikan masyarakat seperti tindakan korupsi pemerintah. Ketika

masyarakat tidak merasakan manfaat atas pajak yang dibayarkan, maka masyarakat itu sendiri akan mencari manfaat untuk dirinya sendiri seperti melakukan *tax evasion* (egoisme etis). Hal tersebut juga sejalan dengan teori persepsi yang mengatakan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor individu yang berupa sifat bawaan dari *gender*, kemudian obyek *tax evasion* yang dipandang pada situasi yang terjadi saat itu seperti korupsi, sistem perpajakan yang tidak adil, dan sebagainya, sehingga menghasilkan persepsi mengenai etika *tax evasion* yaitu etis, tidak etis, atau terkadang etis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alasfour, Samy, dan Bampton (2016) yang mengatakan bahwa *gender* tidak mempengaruhi persepsi mengenai etika *tax evasion* secara signifikan. Hal ini karena walaupun wanita memiliki nilai moral yang tinggi jika dibandingkan dengan pria, akan tetapi ketika berbicara mengenai *tax evasion* mereka memiliki moral yang sama. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial (Ali dan Asrori, 2006:7). Jadi, kemungkinan wanita dan pria tidak memiliki perbedaan persepsi karena moral individu yang sama berdasarkan lingkungan sosial budaya mereka.

Sementara itu, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian McGee *et al.* (2012) serta penelitian Sezgin, Yildiz, dan Ayyildiz (2011). Menurut penelitian yang dilakukan oleh McGee *et al.* (2012), persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* memiliki perbedaan antara pria dan wanita. Selanjutnya, penelitian Sezgin, Yildiz, dan Ayyildiz (2011) juga berpendapat bahwa *gender* memiliki persepsi yang berbeda mengenai etika *tax evasion*. Hal tersebut dikarenakan wanita dianggap

lebih sensitif dan cenderung patuh akan peraturan dibandingkan dengan pria. Namun, penelitian ini tidak membuktikan bahwa perbedaan sifat tersebut mempengaruhi perbedaan persepsi antara pria dan wanita.

Berdasarkan gambaran responden pada penelitian ini, jumlah responden pria dan wanita tidak jauh berbeda sehingga memiliki persepsi yang hampir sama. Kebanyakan responden merupakan mahasiswa Perpajakan S1 (Sarjana) Perpajakan yang belum menempuh mata kuliah *tax planning* karena mereka merupakan angkatan 2018, sehingga belum mengetahui tingkat ilegal dari *tax evasion*. Responden pada umumnya beragama Islam, sehingga dapat kita lihat bahwa beberapa muslim tetap menganggap *tax evasion* etis walaupun sebenarnya hal tersebut diharamkan di agamanya. Jadi, dengan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh responden tersebut merupakan hal yang mungkin menyebabkan tidak adanya perbedaan persepsi antara pria dan wanita mengenai etika *tax evasion*.

2. Perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* oleh mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya berdasarkan *education level*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa D3 (Vokasi) dan S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya terhadap persepsi mengenai etika *tax evasion*, sehingga hipotesis (H₂) diterima. Hasil penelitian ini mendukung Teori Teleologi ketika kita melihatnya dari persepsi mahasiswa S1 (Sarjana) Perpajakan. Sementara itu, persepsi mahasiswa D3 (Vokasi) Perpajakan Universitas Brawijaya tidak mendukung Teori Teleologi karena berpendapat bahwa bagaimana pun keadaannya, *tax evasion* merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan walaupun

mahasiswa tersebut merasa dirugikan. Ketika masyarakat dirugikan, hal ini berarti bahwa banyak pihak yang tidak mendapatkan manfaat sehingga tidak sejalan dengan Etika Utilitarianisme pada Teori Teleologi. Namun, jika kita melihat persepsi mahasiswa S1 (Sarjana) Perpajakan yang berpersepsi bahwa *tax evasion* etis dalam beberapa kondisi, menggambarkan Egoisme Etis pada Teori Teleologi karena individu tersebut mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Hal tersebut juga sesuai dengan teori persepsi yang mengatakan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor individu yang berupa pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan *education level*nya, kemudian obyek *tax evasion* yang dipandang pada situasi yang terjadi saat itu seperti korupsi, sistem perpajakan yang tidak adil, dan sebagainya, sehingga menghasilkan persepsi mengenai etika *tax evasion* yaitu etis, tidak etis, atau terkadang etis.

Sementara itu, mahasiswa S1 (Sarjana) Universitas Brawijaya lebih menganggap bahwa *tax evasion* merupakan hal yang etis dilakukan dengan beberapa kondisi salah satunya seperti sistem perpajakan yang tidak adil. Sebaliknya, jika sistem perpajakan adil maka mahasiswa S1 (Sarjana) Universitas Brawijaya akan menganggap bahwa *tax evasion* merupakan hal yang tidak etis. Hal ini sejalan dengan etika utilitarianisme pada Teori Teleologi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee, Aljaaidi, dan MUSAIBAH (2012), serta McGee *et al.* (2012) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika *tax evasion* berdasarkan tingkat studi (*education level*). Penelitian McGee, Aljaaidi, dan MUSAIBAH (2012) mengatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh pengetahuan yang berbeda-beda berdasarkan *education*

levelnya. Sementara itu, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2012) yang menyatakan bahwa persepsi mengenai etika *tax evasion* berdasarkan education level tidak signifikan.

Berdasarkan gambaran responden pada penelitian ini, mayoritas responden wanita pada Program D3 (Vokasi) cenderung lebih menganggap *tax evasion* tidak etis. Sementara itu, responden wanita pada Program S1 (Sarjana) cenderung menganggap *tax evasion* merupakan hal yang etis dalam beberapa kondisi sehingga hal ini mempengaruhi perbedaan persepsi berdasarkan *education level*. Namun, responden pria baik Program Studi D3 (Vokasi) maupun S1 (Sarjana) Perpajakan tidak memiliki perbedaan yaitu menganggap *tax evasion* merupakan tindakan yang etis dalam beberapa kondisi.

Kebanyakan responden merupakan mahasiswa Perpajakan S1 (Sarjana) Perpajakan yang belum menempuh mata kuliah *tax planning* karena mereka merupakan angkatan 2018 sehingga belum begitu paham tingkat ilegalitas dari *tax evasion*. Responden pada umumnya beragama Islam, sehingga membuktikan beberapa muslim masih menyetujui *tax evasion* dengan beberapa kondisi tertentu. Jadi, dengan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh responden tersebut merupakan hal yang mungkin menyebabkan adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa D3 (Vokasi) Perpajakan Universitas Brawijaya dan mahasiswa S1 (Sarjana) Perpajakan Universitas Brawijaya mengenai etika *tax evasion*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* jika dibedakannya berdasarkan *gender*. Hal itu menyebabkan pemerintah dapat memberlakukan kebijakan pajak yang sama antara pria dan wanita. Namun, penelitian ini dapat membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika *tax evasion* jika dibedakan berdasarkan *education level*. Hal ini mendukung teori Teleologi jika kita melihatnya dari *gender* yang menempuh Program S1 (Sarjana) Perpajakan di Universitas Brawijaya. Namun, jika kita melihatnya dari *education level* terdapat perbedaan persepsi, mahasiswa Program D3 (Vokasi) Perpajakan berpersepsi bahwa *tax evasion* tidak etis walaupun terdapat beberapa kondisi yang merugikan masyarakat. Hal tersebut tidak sejalan dengan Etika Utilitarianisme pada Teori Teleologi. Sementara itu mahasiswa Program S1 (Sarjana) Perpajakan berpersepsi bahwa *tax evasion* etis dalam beberapa kondisi. Ketika beberapa kondisi tersebut merugikan masyarakat sehingga tidak sejalan dengan Etika Utilitarianisme pada Teori Teleologi karena masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari membayar pajak, maka mereka cenderung melakukan *tax evasion* untuk mendapatkan manfaatnya sendiri yang sejalan dengan Egoisme Etis pada Teori Teleologi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka diharapkan lembaga pendidikan dalam hal ini yaitu Vokasi dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dapat memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai *tax evasion*. Hal ini karena terdapat beberapa mahasiswa yang menganggap bahwa *tax evasion* etis untuk dilakukan dengan beberapa kondisi tertentu. Jadi, mahasiswa perlu diberikan pembelajaran mendalam mengenai tingkat keilegalan dari *tax evasion*.

Selanjutnya, diharapkan pemerintah dapat mengubah persepsi mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak dengan memperbaiki kinerja pemerintahan. Perbaikan kinerja pemerintahan yaitu dengan memberikan fasilitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, sehingga pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dirasakan manfaatnya. Sepatutnya sebagai otoritas pajak yang dipercaya untuk mengumpulkan penerimaan pajak harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak melakukan korupsi dan adanya transparansi. Selain itu, tingkat diskriminasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan sebagainya dapat diminimalisir. Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya mahasiswa sebagai calon wajib pajak dapat mempercayai kembali dan meminimalisir tindakan *tax evasion*.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan di Universitas Brawijaya Malang. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu ebaiknya populasi penelitian diperluas, tidak hanya mahasiswa Perpajakan Vokasi dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penelitian selanjutnya juga bisa

membandingkannya antara Universitas Brawijaya dengan universitas lain. Selanjutnya, perbedaan persepsi mengenai etika *tax evasion* bisa ditinjau lebih detail dengan meneliti pengaruh karakteristik responden terhadap persepsi etika *tax evasion* melalui moral atau menambahkan variabel pembeda yaitu seperti agama dan usia.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ahmadamin. 1975. Etika: Ilmu Akhlak. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alasfour, F., Samy, M. dan Bampton, R. 2016, The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan. *Emerald Group Publishing Limited*. 23, 125-171.
- Ali, M dan M. Asrori. 2006. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azmi, A. A., dan K. A. Perumal. 2011. Tax Fairness Dimensions in Asian Context: The Malaysian Perspective. *International Review of Business Research Papers*, 4(5), 11-19.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2019. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html>. Diakses tanggal 15 Agustus 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010. Sensus Penduduk. <https://jateng.bps.go.id/>. Diakses tanggal 6 September 2019.
- Bo, E. E., P. J. Lambert, dan T. O. Thoresen. 2012. Horizontal Inequity Under a Dual Income Tax System: Principles and Measurement. *International Tax and Public Finance*. 19(5), 625-640.
- Brink, W. dan T. Porcano. 2016. The Impact of Culture and Economic Structure on Tax Morale and Tax Evasion: A Country-Level Analysis Using SEM. *Emerald Group Publishing Limited*. 23, 87-123.
- Burton, R. 2014. Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Cohn, Gordon. 1998. The Jewish View on Paying Taxes. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*. 1(2), 109-120.
- Crumble, D. Larry, Jack P. Friedman, dan Susan B. Anders. 1994. Dictionary of Tax Terms. New York: Barron's Business Guide.
- Darmawan. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- DeMoville, Wig. 1998. The Ethics of Tax Evasion: A Baha'i Perspective. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*. 1(3), 356-368.
- Dwihantoro, Prihatin. 2013. Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik. *Politika*. 4(2), 13-21.



- Ethics Unwrapped. 2019. Social Contract Theory. <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/social-contract-theory>. Diakses tanggal 24 Juli 2019.
- Fakih, M. 2004. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Faradiza, Sekar Akrom. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. 11 (1), 53-74
- Fatimah, S., dan D. K. Wardani. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*. 1, 1-14.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartman, L. P., dan Desjardins. 2008. Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility . New York: McGraw-Hill.
- Haspels, Neliën dan Busakorn Suriyasarn. 2005. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Hair, J. F., *et al.* 2007. Multivariate Data Analysis 6th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Himawan, A. 2017. Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp. 110 Triliun. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>. Diakses tanggal 6 Juli 2019.
- Hutagalung, S., dan M. S. Perdhana. 2016. Pengaruh Karakteristik Demografis (Usia, Gender, Pendidikan), Masa Kerja, dan Kepuasan Gaji terhadap Komitmen Afektif. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, 13, 171-180.
- Ichwanudin, W., Akhmadi, Yanto A. S. 2014. Modul Praktikum Alat Analisis Statistik. Serang: Laboratorium Studi Manajemen.
- Ihsan, F. 2003. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- IlmuGeografi.com. 2019. 135 Negara Maju dan Negara Berkembang di Dunia (Paling Lengkap). <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/negara-maju-dan-negara-berkembang-di-dunia>. Diakses tanggal 2 September 2019.

- Indonesia. go.id. 2019. <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>. Diakses tanggal 27 November 2019.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriyani, Mila, S. Nurlela, dan E.M. Wahyuningsih. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*. 818-825.
- Infokampusnews. 2019. <https://infokampus.news/daya-tampung-ub-2019/>. Diakses tanggal 27 November 2019.
- Jugiyanto, H. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- KBBI Daring. 2016. Adil. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. Diakses tanggal 28 Juni 2019.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kreitner dan Kinicki. 2014. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Laskar, Manzoor Elahi. 2013. Summary of Social Contract Theory by Hobbes, Locke, and Rousseau. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2410525. Diakses tanggal 24 Juli 2019.
- Lietz, Gerrit. 2013. Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework. *University of Munster*. 1-67.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan Edisi.2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McGee, R. W. 2006. Three Views On The Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*. 15-35.
- McGee, R. W. 2007. Corporate Governance in Russia: A Case Study of Timeless of Financial Reporting in The Telecom Industry. *Journal of Accounting Ethics and Public Policy*. 2(1), 1-4.
- McGee , R. W., K. S. Aljaaidi, dan A. S. Musaibah. 2012. The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Student in Yemen. *International Journal of Business and Management*. 7(16), 1-12.

- McGee, R. W. dan Y. An. 2008. A Survey of Chinese Business and Economics Students on The Ethics of Tax Evasion. *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies*. 409-421.
- McGee, R. W., S. S. Ho, dan A. Y. Li. 2008. A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: HongKong Vs The United States. *Journal of Business Ethics*. 77, 147-158.
- McGee, R. W., I. Nickerson, L. Pleshko, dan M. Broihahn. 2012. The Ethics of Tax Evasion: An Investigation Into Demographic Differences. *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*. 15(1), 105-117.
- McGee, R. W., dan S.L. Palau. 2008. Tax Evasion and Ethics: A Comparative Study of The USA and Four Latin American Countries. *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies*. 185-224.
- McGee, R. W. 2012. The ethics of tax evasion: perspectives in theory and practice. *Springer Science Business Media*. 1-34.
- McGee, R. W. dan Jovan Shopovski. 2018. The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Law and Economics Students in The Republic of Macedonia. *International Journal of Economics Science*. 7(2), 57-69.
- McGee, R.W., Arsen M. Djatej, dan Robert H. S. Sarikas. 2012. The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Hispanic Opinion. *Accounting and Taxation*. 4(1), 53-74.siringi
- McGee, R.W. dan Zhiwen Guo. 2007. A Survey of Law, Business, and Philosophy Students in China on The Ethics of Tax Evasion. *Society and Business Review*. 2(3), 299-315.
- Media Business News. 2012. <https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/tax-evasion-definition-meaning/>. Diakses tanggal 5 Juli 2019.
- Minauli, I., Nilva Desriana, dan Yossetta M.R Tuapattinaya. 2006. Perbedaan Penanganan Kemarahan pada Situasi Konflik dalam Keluarga Suku Jawa, Batak, dan Minangkabau. *Psikologia Journal*. 2(1), 1-6.
- Mosse, J. C. 1996. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujiyati, Fitria Riski Rohmawati, dan Fitria Riski Rohmawati. 2017. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta). *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper*. 1-14.
- Narimawati, Umi. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media.
- Nickerson, I., L. Pleshko, dan Robert W. McGee. 2009. Presenting The Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*. 12(1).

- Nkundabanyanga, Stephen Korutaro, et.al. 2017. Tax Compliance In A Developing Country (Understanding taxpayers' compliance decision by their perceptions). *Journal of Economic Studies*.
- Nurhaeni, Isma Dwi Astuti. 2009. Kebijakan Publik Pro Gender. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Nurmantu, S. 2005. Pengantar Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Oakley, Ann. 1972. Sex, Gender, and Society. New York: Temple Smith.
- Pengertian Menurut Para Ahli. 2019. Pengertian Suku Bangsa Secara Umum. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-suku-bangsa-secara-umum/>. Diakses tanggal 11 Juli 2019.
- Poespoprodjo, W. 1999. Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktek, Bandung: Pustaka Grafika.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Prasetyo, Sigit. 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta. Skripsi. *Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*. -
- Pratley, Peter. 1997. Etika Bisnis (The Essence of Business Ethic), diterjemahkan oleh Gunawan Prasetio. Yogyakarta : Penerbit Andi bekerjasama dengan Simon & Schuster (Asia) Pte.Ltd.
- Priadana, M. S. dan S. Muis. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prihanto, Hendi. 2018. Etika Bisnis & Profesi: Sebuah Pencarian. Rajawali Pers: Depok.
- Primawati, Lucia. 2001. Sikap Kerja, Motivasi, Persepsi Diskriminasi dan Komitmen Organisasi Akuntan Manajemen dilihat dari Perbedaan Gender dan Jabatan. *Tesis. Universitas Diponegoro*.-
- Priyanto, D. 2008. Mandiri Belajar SPSS. Yogyakarta: MediaKom.
- Ratnawati, Tina, et.al. 2016. Etika Lingkungan. Penerbit Universitas Terbuka: Banten.
- Reed, Sarah A., Stanley H. Kratchman, dan Robert H. Strawser. 1994. Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intentions of United States Accountants. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. 7(1), 31-58.
- Rohman, Beby Nurdiana. 2019. Apasih, Bedanya D1, D2, D3, D4, dan S1. <https://www.youthmanual.com/post/dunia-sekolah/persiapan-kuliah/apasih-bedanya-d1-d2-d3-d4-dan-s1>. Diakses tanggal 6 September 2019.

- Rousseau, Jean Jacques. 1986. *The Social Contract*, Terjemah Oleh Sumardjo. Jakarta: Erlangga.
- Salam, Burhanuddin. 1997. *Etika Sosial (Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samekto, Agus. 1999. Perbedaan Kinerja Laki-Laki dan Wanita pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. *Tesis M.Si. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.*-
- Sarwono, Sarlito W. 1999. *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*: Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sezgin, Z., S. Yildiz, dan Y. Ayyildiz. 2011. The Ethics of Tax Evasion: A Comparative Study of Turkey and Kyrgyzstan. *Journal of Applied Business and Economics*. 12(3), 75-90.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Siringoringo, G. T. 2018. Pengaruh Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Direktori Jurnal Elektronik Universitas Brawijaya*. 31-39.
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan Pajak 1994*. Bandung: Eresco.
- Sommerfeld, Ray M. 1982. *Illustrated edition: An introduction to taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.has
- Suriasumantri, Jujun S. 2003. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2008. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suminarsasi, Wahyu, & Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *PPJK 15 Universitas Gadjah Mada*. 23-35.
- Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
- Tampubolon. 2012. Perilaku Keorganisasian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tedjosaputro, L. 2003. Etika Profesi dan Etika Hukum. Semarang: Aneka Ilmu.
- Turley, G. 2008. Taxation Transition and The State: The Case of Russia. *Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies*.547-573.
- Widiyanto, J. 2010. SPSS for Windows: Untuk Analisis Data Statistik dan Penelitian . Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Widhiarso, Wahyu. (2010). Pengembangan Skala Psikologi. *Jurnal Universitas Gajah Mada,-*
- Widjaja, P. N., L. Lambey, dan S.K. Walandouw. 2017. Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concert*. 12(2), 541-552.
- Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. 1(2), 183–193.
- Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance, and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*. 20(1), 1-20.
- Yee, Chan Pui, Krishna Moorthy, dan William Choo Keng Soon. 2017. Taxpayers' Perceptions On Tax Evasion Behaviour: An Empirical Study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*. 59, 413-429.
- Yani, Irma Rahma. 2018. Peningkatan pemahaman mata pelajaran IPS materi keragaman suku bangsa dan budaya indonesia melalui media POKARSO (pop up dan kartu soal) di kelas IV MI Muhammadiyah 23 Surabaya. *Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya*.1-107.
- Yosephus, L. Sinuor. 2010. Etika Bisnis : Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yuwono, Hanang. 2016. <https://solo.tribunnews.com/2016/05/10/mengapa-lebih-banyak-dicari-karyawan-wanita-ketimbang-pria-ternyata-ini-alasannya>. Diakses tanggal 27 November 2019.

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran 1

Surat Pra Riset D3 Perpajakan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 9285 /UN10.F03.12/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Pra Riset/Survey Skripsi

Kepada : Yth. Kepala Bagian Akademik
 Vokasi Universitas Brawijaya
 Jl. Veteran No.12-13 Malang
 Jawa Timur 65145

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Fatimah Nur Adha
 Alamat : Jl. Bunga Andong Barat No. 19, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65141
 NIM : 155030407111056
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Perbedaan Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika *Tax Evasion* Berdasarkan *Gender*, Suku Bangsa, dan *Education Level* (Studi pada Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya)
 Lamanya : 10 hari (13 Agustus -23 Agustus)
 Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Agustus 2019
 an Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis



Dr. Mochammad Al Musadieg, M.BA
 NIP. 19580501 198403 1 001



Lampiran 2

Surat Pra Riset S1 Perpajakan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 9285 /UN10.F03.12/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Pra Riset/Survey Skripsi

Kepada : Yth. Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 163, Malang, Indonesia

Jawa Timur 65145

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Fatimah Nur Adha

Alamat : Jl. Bunga Andong Barat No. 19, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota
 Malang 65141

NIM : 155030407111056

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Perbedaan Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika *Tax Evasion* Berdasarkan
Gender, Suku Bangsa, dan *Education Level* (Studi pada Mahasiswa
 Perpajakan Universitas Brawijaya)

Lamanya : 10 hari (13 Agustus -23 Agustus)

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Agustus 2019

a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

Dr. Mochammad Al Musadieq, M.BA
 NIP. 19580501 198403 1 001



Lampiran 3
Data Uji Pilot Test



(terpisah di file tersendiri)

Lampiran 4
Uji Validitas



(terpisah di file tersendiri)

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,898	18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1.1	47,63	116,102	,656	,889
Y.1.2	47,40	118,248	,529	,893
Y.1.3	47,43	120,323	,437	,896
Y.1.4	47,30	121,941	,431	,896
Y.1.5	47,13	115,844	,675	,889
Y.1.6	46,93	115,995	,717	,888
Y.1.7	46,33	118,782	,522	,893
Y.1.8	46,73	115,030	,620	,890
Y.1.9	46,37	117,757	,498	,894
Y.1.10	47,93	125,306	,344	,898
Y.1.11	46,90	114,921	,633	,890
Y.1.12	46,87	111,430	,753	,885
Y.1.13	46,73	116,754	,678	,889

Y.1.14	47,20	116,372	,544	,893
Y.1.15	47,17	121,316	,413	,897
Y.1.16	47,50	123,845	,343	,898
Y.1.17	46,97	117,482	,583	,891
Y.1.18	46,63	120,240	,388	,898



Lampiran 6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PERCEPTION
N		293
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	44.06
	Std. Deviation	10.617
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		1.329
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 7

Statistik Deskriptif

Univariate Analysis of Variance

Descriptive Statistics

Dependent Variable: PERCEPTION

GENDER	EDUCATION LEVEL	Mean	Std. Deviation	N
M	D3	43.46	10.623	48
	S1	48.46	12.231	59
	Total	46.21	11.753	107
W	D3	37.03	7.417	68
	S1	46.15	9.342	118
	Total	42.82	9.723	186
Total	D3	39.69	9.396	116
	S1	46.92	10.417	177
	Total	44.06	10.617	293

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: PERCEPTION

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	5036.258 ^a	3	1678.753	17.403	.000
Intercept	502916.648	1	502916.648	5213.580	.000
GENDER	1251.299	1	1251.299	12.972	.000
EDLEV	3271.543	1	3271.543	33.915	.000
GENDER * EDLEV	278.957	1	278.957	2.892	.090
Error	27877.756	289	96.463		
Total	601659.000	293			
Corrected Total	32914.014	292			

a. R Squared = .153 (Adjusted R Squared = .144)

Lampiran 8

Independent Samples t-test

Group Statistics

GENDER		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERCEPTION	M	107	46.21	11.753	1.136
	W	186	42.82	9.723	.713

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
PERCEPTION	Equal variances assumed	.110	.740	2.665	291	.008	3.40	1.275	.888	5.907
	Equal variances not assumed			2.533	189.095	.012	3.40	1.341	.752	6.044

Group Statistics

EDUCATION LEVEL		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERCEPTION	S1	177	46.92	10.417	.783
	D3	116	39.69	9.396	.872

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
PERCEPTION	Equal variances assumed	1.908	.168	6.038	291	.000	7.23	1.198	4.874	9.588
	Equal variances not assumed			6.169	263.264	.000	7.23	1.172	4.923	9.539

Lampiran 9 Pembagian Kuesioner



CURRICULUM VITAE**DATA PRIBADI**

Nama : Fatimah Nur Adha
 NIM : 155030407111056
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 28 April 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Komplek Kodam Bintaro
 Jalan Cempedak No. 39A RT.002, RW.004
 Kel. Pesanggrahan – Kec. Pesanggrahan
 Jakarta Selatan, 12320
 Nomor Hp : 082110774045
 Email : fatimahhh28@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

Tingkat Pendidikan	Tahun Belajar
SDN 08 PETANG PESANGGRAHAN	2002-2008
SMP NEGERI 235 JAKARTA	2008-2011
SMA NEGERI 86 JAKARTA	2011-2014
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	2015-2019

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Kegiatan	Instansi	Tahun
Relawan Pajak	KPP Malang Utara dan Selatan	2018
Magang	PT. IOL Indonesia	2018

RIWAYAT ORGANISASI

Nama Lembaga	Tahun	Jabatan
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)	2012-2013	Sekretaris II
Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPAJAK)	2015-2016	Staff Muda Biro Humas
Badan Eksekutif Mahasiswa	2016-2017	Staff Tetap Kementerian Kominfo
Sanggar Seni Mahasiswa (SSM)	2015-2017	<i>Talent Theater</i>
<i>Administration Music Club</i> (AMC)	2018-2019	<i>Event Organizer</i> (EO)
Mahasiswa Pecinta Alam Teknik Gigi (MATEGIPALA)	Seumur Hidup	Anggota

RIWAYAT KEPANITIAAN

Nama Kegiatan	Tahun	Jabatan
Musyawarah Besar	2015	Anggota Sie. Transperkom
Bina Desa Mandiri	2016	Anggota Divisi Humas
Studi Banding	2016	Anggota Divisi Acara
<i>FIA Goes To and Welcome To</i>	2016	Ketua Pelaksana
Sabarjak	2016	CO Divisi Kestari
Seminar Nasional dan <i>Workshop</i> “ <i>Indonesia Youngvestor</i> ”	2017	Staff <i>Public Relation</i>

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya.